

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
(Studi Kasus BUMDes DKI JAYA Desa Duku Ilir,
Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah



OLEH :

NURSELLA

NIM. 19681035

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

IAIN CURUP

2023

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
di

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara NURSELLA mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI KASUS BUMDes DKI JAYA DESA DUKU ILIR, CURUP TIMUR, REJANG LEBONG)", sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Curup, 12 Juli 2023

Pembimbing I



Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP.197711052009011007

Pembimbing II



Sincha Arli Silvia, S.E.I, ME
NIDN.19051991

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nursella
Nim : 19681035
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 7 Agustus 2023

Peneliti,

Nursella

NIM. 19681035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotab. Pos 108 Telp. (0752) 21030-21755 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 298/In.34/FS/PP.00.9/ 28/2023

Nama : **NURSELLA**
NIM : **19681035**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Judul : **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus BUMDes DKI JAYA Desa Duku Ilir, Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 24 Juli 2023**
Pukul : **13.30-15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Lantai 2**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Musda Asmara, M.A
NIP. 19870910 201903 2 014

Sekretaris,

Pefriyandi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

Penguji I,

Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 19900619 201801 2 001

Penguji II,

Andriko, M.E.Sy
NIP. 19890101 201903 1 019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefa, M.Ag
NIP. 19260201 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Hirabbil'alamiin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus BUMDes DKI JAYA Desa Duku Ilir, Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu)**, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan, saran dan informasi yang peneliti sangat butuhkan dalam penyusunan skripsi yang peneliti lakukan, sehingga penulisan laporan penelitian dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd, Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
4. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I sebagai pembimbing I yang telah

banyak membimbing peneliti dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Sineba Arli Silvia, S.E.I.,ME selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rahman Arifin, M.E selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahan terkhususnya dalam proses akademik peneliti.
7. Ibu Ratih Komala Dewi, M.M selaku penguji I yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Andriko, ME.Sy selaku penguji II yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah sabar dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami
10. Kepala Desa di Desa Duku Ilir beserta Ketua BUMDes DKI JAYA yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada BUMDes DKI JAYA di Desa Duku Ilir.
11. Semua pihak informan yang telah sudi direpotkan oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi yang peneliti cari dalam penelitian ini
12. Almamater IAIN Curup yang peneliti banggakan.

Penelitian telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun, sehingga dapat memperbaiki yang kurang pas serta dapat meningkatkan kualitas karya-karya selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, 12 Juli 2023

Peneliti

Nursella

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al- Insyirah: 5-6)

“Perjuangkan hidupmu sendiri. Terjatuh berdiri lagi. Tidak ada waktu
untuk memelas kasih, tidak ada waktu untuk meminta-minta. Selama
nyawa masih ada di badan, selama tenaga masih bisa digunakan.

Bertarunglah untuk menghadap hidup ini.”

(Boycandra)

“Orang tuaku adalah semua kekuatanku.

Jika bukan karena mereka, mungkin aku sudah menyerah sejak lama.”

(Nursella)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang maha Esa atas dukungan dan do`a dari orang-orang tercinta, Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan senantiasa mendampingi di saat suka dan duka:

- ❖ Kupersembahkan Dharma Baktiku kepada lelaki terhebat Bapak Sumarno dan wanita tercantik Ibundaku tercinta Aswari yang telah banyak berjuang dalam membesarkanku, mendidik, membiayai, dan menginginkanku menjadi yang terbaik. Serta tidak pernah hentinya memberiku motivasi dan semangat untuk menyelesaikan pendidikanku, hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan studi S1 dan memenuhi harapan terbesar Bapak & Ibu.
- ❖ Terimakasih kepada Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I dosen pembimbing I dan Ibu Sineba Arli Silvia, S.E.I.,ME selaku dosen pembimbing II yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
- ❖ Terimakasih dan semangat untuk teman-teman seperjuangan program studi ekonomi syariah angkatan 2019 IAIN Curup terkhusus untuk : Ulan Ursan, Sapni Nabila, Wilis Indriyani dan Yoga Dwi Putra.
- ❖ Terimakasih Almamaterku tercinta IAIN Curup.

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
(Studi Kasus BUMDes DKI JAYA Desa Duku Ilir, Curup Timur,
Rejang Lebong, Bengkulu)**

Abstrak

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dibidang pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes DKI JAYA di masyarakat Desa Duku Ilir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menurut teori Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pemberdayan ekonomi masyarakat belum terlaksana melalui pengelolaan BUMDes DKI JAYA, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat serta tahapan dalam pemberdayaan belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes DKI JAYA, sehingga potensi yang terdapat pada desa dan juga masyarakat belum diperdayakan dengan baik. 2) Kendala yang dihadapi BUMDes yaitu tidak adanya dana dan juga kantor kerja, serta kurangnya pemahaman masyarakat desa. 3) Adapun strategi-strategi yang dilakukan BUMDes DKI JAYA yaitu melakukan kerja sama dengan pemerintah desa dalam urusan kantor dan juga pendanaan, serta melaksanakan sosialisasi mengenai BUMDes DKI JAYA kepada seluruh masyarakat.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan, BUMDes*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Literatur	8
G. Penjelasan Judul.....	13
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	13
b. Pengelolaan.....	14
c. BUMDes.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	18
BAB II.....	20
TEORI DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	20
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	20

2.	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	23
3.	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	25
B.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	28
1.	Ekonomi Masyarakat.....	28
2.	Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	30
3.	Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat	31
4.	Konsep Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	32
5.	Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	35
C.	Tinjauan Pengertian Pengelolaan.....	37
D.	Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	38
1.	Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	38
2.	Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	41
3.	Landasan Hukum BUMDes	43
4.	Tujuan Badan Usaha Milik Desa.....	44
5.	Prinsip Tata Kelola BUMDes.....	45
6.	Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	47
BAB III	51
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	51
A.	Profil Desa Duku Ilir	51
1.	Letak Geografis	51
2.	Sejarah Desa Duku Ilir	52
B.	Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) DKI JAYA	53
1.	Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) DKI JAYA.....	53
2.	Visi dan Misi BUMDes DKI JAYA.....	54
3.	Bentuk dan Fungsi BUMDes DKI JAYA	55
4.	Susunan Kepengurusan	56
5.	Jenis Usaha BadanUsaha Milik Desa DKI JAYA.....	56
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN	58
A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	58

1. Pengelolaan BUMDes DKI JAYA Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Duku Ilir	58
2. Kendala yang Dihadapi BUMDes DKI JAYA Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Duku Ilir	72
3. Strategi yang Dilakukan BUMDes DKI JAYA Dalam Menghadapi Kendala Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Duku Ilir.....	74
BAB V.....	79
KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada Negara Indonesia dimulai dari daerah- daerah terpencil dengan tujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya dan untuk mencapai pembangunan tersebut maka semua potensi yang harus digali, dikembangkan serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap daerah memiliki potensi yang besar dan berbeda pada setiap daerahnya, daerah terpencil memiliki desa-desa yang memiliki potensi masing-masing seperti bidang sosial, budaya dan ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian.¹

Desa memiliki posisi yang strategis sebagai pilar dari pembangunan nasional. Kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang dekat dengan masyarakat yang membuat semua panduan operasional desa yang dibutuhkan tersedia. Desa merupakan tempat dimana sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat sangat melimpah, jika kedua potensi itu dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik serta mampu mensejahterahkan masyarakat desa tersebut.²

Tetapi pada saat ini hanya sedikit desa yang telah mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adanya intervensi pemerintah yang menghambat daya kreatifitas serta inovasi masyarakat desa dalam

¹ Mahendra Wijaya, "Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Journal Of Rural And Development* Volume 1 No. 1 (Februari 2010), hlm.4.

² Ratna Azis Prasetyo, "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Dialektika* Volume Xi No.1 (Maret 2016), hlm.84.

mengelola perekonomian dipedesaan dan berdampak dengan terdapat banyak potensi desa ataupun masyarakatnya yang tidak berkembang karena tidak dimanfaatkan dengan baik.³ Baik sistem ataupun mekanisme kelembagaan ekonomi yang berada dipedesaan tidak dapat berjalan secara efektif dan bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Desa harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi.⁴

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang mengelola dan menjalankan kegiatan ekonomi desa dan dikelola penuh oleh masyarakat serta kepemilikannya dikontrol bersama dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan standar hidup masyarakat.⁵ Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa. Dengan demikian, setiap desa memiliki BUMDes yang beragam dan berbeda sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing disetiap desa. Lembaga ini searah dengan kepentingan masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraannya.⁶

³ Irawan Fakhrudin Mahalizikri, "Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha Bumdes Desa Sepotong," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Volume 8 No.1 (Juni 2019), hlm.89.

⁴ Yulianus Nardin, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes," *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 8 No. 3 (2019).

⁵ David Wijaya, *Bum Desa*, 1 Ed., 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.91.

⁶ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan Bumdes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3 (Desember 2013), hlm.357.

BUMDes diharapkan mampu menjadi sebuah alternatif dalam memberdayakan masyarakat desa, karena hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan sangat penting karena merupakan suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan desa.⁷ Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dibangun melalui empat pilar, yaitu kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, keterlibatan masyarakat pada tata pemerintahan desa, penguasaan literasi keuangan usaha, serta pengembangan serta pengelolaan BUMDes yang handal. Pengelolaann BUMDes yang handal adalah pilar paling akhir dalam mendukung perekonomian demokratis.⁸

BUMDes adalah usaha yang telah dirancang oleh pemerintah desa untuk dapat mengelola potensi yang terdapat di desa dan dibantu serta dimonitoring oleh dinas pemberdayaan dan desa. Keberadaannya diharapkan mampu untuk menjadi roda penggerak dari pembangunan desa dan dapat memberikan peningkatan yang signifikan. BUMDes adalah lembaga yang keberadaannya dapat untuk dimanfaatkan sebagai salah satu unit usaha yang diharapkan mampu memberikan dorongan masyarakat untuk lebih produktif dan kreatif.⁹

⁷ Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmupolitik* Vol. 8 No. 4 (2019), hlm.369.

⁸ *Ibid*, David Wijaya, hlm.64.

⁹ Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.3 (September 2014), hlm.26.

BUMDes di Desa Duku Ilir bernama BUMDes DKI JAYA yang telah dibentuk sejak tahun 2016 dan memiliki beberapa kelompok unit usaha yaitu, unit usaha peternakan kambing, unit usaha pembuatan kue, unit usaha peminjaman alat tenda serta unit usaha alumunium, dari beberapa unit usaha tersebut pihak BUMDes telah berhasil membantu beberapa permasalahan perekonomian masyarakat serta dapat memberikan dampak yang baik untuk seluruh masyarakat desa, unit usaha BUMDes DKI JAYA sebagian penuhnya dijalankan oleh pihak-pihak masyarakat yang memiliki kemauan dan keahlian serta kemampuan dalam bidang unit usaha tersebut. Sejak diberdirikannya BUMDes ini telah mengalami pergantian ketua dan anggotanya karena beberapa faktor yang tidak dijelaskan secara detail oleh Kepala Desa, tetapi BUMdes DKI JAYA telah berhasil melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah desa dengan melibatkannya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak BUMDes ini.¹⁰

Pendirian BUMDes di Desa Duku Ilir itu sendiri dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan kerjasama antar desa atau bekerja sama dengan perusahaan sekitar. Desa Duku Ilir merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak. Terdapat banyak potensi yang terdapat di Desa Duku Ilir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakatnya, yaitu melimpahnya hasil pertanian dan peternakan, luasnya daerah perairan dan lahan

¹⁰ Adam Khalik, *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2023, Pukul 14.25.

pertanian, serta SDMnya. Potensi lainnya yang juga dimiliki oleh masyarakat Desa Duku Ilir baik dari tingkat pendidikan serta keahliannya diharapkan mampu membawahkan perubahan yang besar bagi masyarakat terutama untuk Desa Duku Ilir. BUMDes sebagai suatu lembaga usaha mandiri masyarakat desa dan ingin memberikan serta membawa masyarakat menuju pada kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, serta dibantu oleh program pemerintah desa yang akan membawahkan dampak positif bagi seluruh masyarakat desa.¹¹

BUMDes dijalankan dengan beberapa kegiatannya yaitu dengan membentuk serta menjalankan satu kegiatan usaha yang mampu menunjang perekonomian serta dapat tetap mengembangkan potensi asli desa sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian masyarakat dan mampu memberi sinergi untuk usaha ekonomi masyarakat yang telah berjalan. Sehingga hal tersebut dapat mendukung usaha masyarakat menjadi usaha yang lebih produktif dan kreatif.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas alasan peneliti untuk meneliti BUMDes DKI JAYA yang terletak di Desa Duku Ilir karena tertarik untuk menggali dan mengkaji lebih dalam lagi BUMDes DKI JAYA pada pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur melalui keberadaan BUMDes. Mengingat bahwa BUMDes

¹¹ Adam Khalik, (2023).

¹² Harry Gunawan, Sofyan Muhlisin, dan Gunawan Ikhtiono, "Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor," *El-Maal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Volume 5 Nomor 1 (2022), <https://doi.org/1047467/elmal.v5i1.619>, hlm.23.

merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tujuan untuk memperkecil angka kemiskinan di desa, selain itu BUMDes merupakan lembaga yang memiliki upaya yang besar untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDes (Studi Kasus: BUMDes DKI JAYA Desa Duku Ilir, Curup Timur, Rejang Lebong)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasannya, maka penelitian ini akan dilakukan sesuai pada prosedur penelitian ilmiah. Maka dari itu peneliti membuat batasan masalah dan hanya berfokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Duku Ilir melalui pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) DKI JAYA, kendala yang dihadapi serta strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku ilir. Dengan objek penelitian di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes DKI JAYA di Desa Duku Ilir?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDes DKI JAYA dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan BUMDes DKI JAYA dalam menghadapi kendala pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes DKI JAYA di Desa Duku Ilir, Curup Timur, Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BUMDes DKI JAYA dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Duku Ilir.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BUMDes DKI JAYA dalam menghadapi kendala pada pemberdayaan perekonomian masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

perkembangan ilmu Ekonomi Islam terkait dengan perekonomian masyarakat di Desa Duku Ilir melalui pengelolaan BUMDes melalui potensi dan juga keahlian yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Serta mampu menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang untuk dapat mengembangkan pengetahuan, khususnya pada bidang sosial dan ekonomi seputar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktis

- a. Kelembagaan BUMDes DKI JAYA dan Pemerintah Desa Duku Ilir, Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan

evaluasi dalam menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat serta bermanfaat untuk perbaikan program kerja kedepannya dan pengelolaan potensi desa yang tepat sasaran agar pengelolaan BUMDes menjadi lebih baik.

- b. Akademisi , diharapkan mampu menjadi salah satu ilmu yang dapat memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu Ekonomi Syariah dan dapat menjadi bahan bacaan serta refrensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Peneliti, mampu memberikan pemahaman serta wawasan tentang pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Duku Ilir, serta menambah wawasan pada bidang penelitian serta implementasi teori yang sudah diterima dalam perkuliahan.
- d. Masyarakat, Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi informasi serta pengetahuan dan penambah ilmu bagi semua pihak masyarakat tentang peran pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

F. Kajian Literatur

Dalam rangka untuk membantu peneliti memecahkan masalah dan sebagai studi banding dengan studi sebelumnya tentang Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes, maka peneliti

meyertakan beberapa hasil penelitian yang relevansi dengan penelitian ini yaitu:

1. **Desti Wiratala**, skripsi dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Dan Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, Permasalahan penelitian ini adalah BUMDes memiliki peranan penting pada kondisi serta peningkatan perekonomian masyarakat, dan diharapkan melalui BUMDes para pedagang mampu mengelola potensi yang tersedia dengan sebaiknya serta mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian surevi, dengan teknik pengumpulan data kuisisioner. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh secara parsial dan silmutan antara peran dan pengelolaan BUMDes terhadap peningkatkan ekonomi masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.¹³ Perbedaan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada peran BUMDes serta metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian survey dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisisioner.

¹³ Desti Wiratala, “Pengaruh Pengelolaan Dan Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” (Tulungagung, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020),hlm.2.

2. **Oktavina Ardita Saputri**, Skripsi dengan judul, “Peran Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngunut (Studi Kasus: BUMDes Ngudi Sejahtera, Ngunut, Tulungagung)”, Permasalahan pada penelitian ini adalah SDA yang melimpah di Desa Ngunut tapi belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga peran BUMDes sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan itu melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan hasil penelitian bahwa BUMDes Ngudi Sejahtera memiliki peran penting melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat dan mampu menjadikan perekonomian masyarakat Desa Ngunut menjadi lebih meningkat dan tentunya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.¹⁴ Perbedaan pada penelitian ialah hanya berfokus membahas tentang peran BUMDes melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan yang diteliti saat ini adalah pengelolaan BUMDes.
3. **Neneng Rini Ismawati**, jurnal yang berjudul ”Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada BUMDes Sabar Subur Desa Teluk, Terate Kecamatan

¹⁴ Oktavina Ardita Saputri, “Peran Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngunut (Studi Kasus : BUMDes Ngudi Sejahtera, Ngunut, Tulungagung)” (Tulungagung, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021), hlm.2.

Kramatwatu, Kabupaten Serang-Banten)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (Field research), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat terbantu dengan adanya BUMDes Sabar Subur. Salah satunya dengan memberikan lowongan pekerjaan melalui menjadi pelayan untuk masyarakat yang menganggur karna faktor pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui tahapan penyadaran, pelatihan, pendampingan dan evaluasi dan dengan beberapa unit usaha yang dimilikinya.¹⁵ Perbedaan penelitian ini adalah permasalahannya yang membahas tentang pemberdayaan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan yang diteliti saat ini tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

4. **Zulifah Chikmawati**, jurnal yang berjudul “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia”. Permasalahan penelitian ini adalah Pengembangan dan Pengelolaan SDA dan SDM yang belum optimal setelah beberapa program pemerintah telah dilaksanakan, sehingga dibentuknya BUMDes dengan harapan dapat membantu perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder

¹⁵ Neneng Rini Ismawati, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada BUMDes Sabar Subur Desa Teluk, Terate Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang-Banten),” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.6 No.1 (2020),hlm.91.

yang diambil langsung dari lokasi penelitian yaitu Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kondisi sejumlah warga miskin dan pengangguran (karena faktor pendidikan rendah dan kesempatan kerja kurang) sudah mulai dikirimkan oleh Unit Jasa Naker BUMDes.¹⁶ Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi pedesaan sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta metode dan pendekatan penelitian memiliki perbedaan dan teknik sampling yang berbeda.

5. **Harry Gunawan, Sofyan Muhlisin, dan Gunawan Okhtiono,** jurnal yang berjudul “Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor”. Permasalahan penelitian ini adalah tujuan pementukan BUMDesnya yang diharapkan mampu mendayagunakan semua potensi yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian

¹⁶ Zulifah Chikmawati, “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.5 No.1 (2019), hlm.101.

menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes dilakukan saat musdes sementara hanya kegiatan pinjam yang telah dilaksanakan.¹⁷

G. Penjelasan Judul

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Sumaryadi, Pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk memperkuat lembaga masyarakat supaya dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.¹⁸

Ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan.¹⁹ Disini ekonomi merujuk pada kegiatan atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk keperluan rumah tangga.

Menurut Harton, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relative mandiri yang bersama cukup lama menduduki suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar dari kegiatan dalam kelompok masyarakat.²⁰ Dari

¹⁷ Harry Gunawan, Sofyan Muhlisin, dan Gunawan Ikhtiono, "Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor," *El-Mal :Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol.5 No.1 (2022),hlm.22.

¹⁸ Muhammad Fajar Nandra Caya Dan Ety Rahayu, "Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung," *Urnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Jilid 20 No.11 (April 2019),hlm.62.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi>, Diakses 18 Februari 2023.

²⁰ Neneng Rini Ismawati, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume. 6 No 1 (16 Juni 2020), <https://dx.doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>,hlm.47.

pengertian tersebut masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi antar sesama dengan kawasan wilayah kekuasaan dan adat serta aturan budaya yang sama.

Pemberdayaan Ekonomi masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memotivasi, mendorong serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki serta upaya dalam pengembangannya, hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi masyarakat dalam perekonomian dan pendapatan.²¹

b. Pengelolaan

Menurut Soekanto, pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak hingga dengan proses sampai terwujudnya suatu tujuan.²²

c. BUMDes

Menurut Maryunani, Bumdes adalah suatu lembaga usaha milik desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa dan

²¹ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa," *Jurnal Moderat* Volume 6 No. 1 (Februari 2021), hlm.120.

²² Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Dan Muhammad Arif Nasution, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 10 No.1 (Juni 2018), hlm.24.

membangun rasa sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.²³

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan manusia, sejarah, tingkah laku, dan hubungan kekerabatan. Dengan bentuk kata-kata yang tertulis, ucapan, atau wawancara dan orang-orang serta perilaku yang mampu untuk diamati.²⁴ Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif peneliti mencoba untuk memahami serta memberikan gambaran secara menyeluruh tentang objek yang ingin diteliti.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Maka dari itu, adapun objek penelitiannya adalah objek dilapangan dan diharapkan dapat memenuhi informasi tentang hal yang peneliti kaji. Penelitian ini tidak memerlukan analisis statistik yang rinci dan sifat penelitian untuk menganalisis serta mendeskripsikan fenomena yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ialah bahwa tujuan penelitian ini tidak untuk menguji dan membuktikan suatu teori, serta penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak

²³ Alfiansyah, Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja,(JISIP : Vol. 5. No. 2 Maret 2021) , hlm.213.

²⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Library.Stiba.ac.id, 2014),hlm.73.

melibatkan angka atau statistik, pada penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan secara mendalam tentang fenomena yang dikaji, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan peneliti akan terjawab sepenuhnya jika peneliti melakukan pendekatan yang intens untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah BUMDES DKI JAYA yang berada di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan dari subjek penelitian dalam hal ini pengambilan langsung pada subjek sebagai suatu informasi. Kemudian data tersebut dikumpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan peneliti. Data primer ialah data yang didapatkan serta diambil langsung yang dihasilkan dari wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Ketua BUMDES beserta anggotanya, Pemerintah Desa Duku Ilir , pengelola unit usaha BUMDes dan masyarakat dengan jumlah keseluruhan yang akan diwawancarai yaitu 10 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diterima langsung dari subjek penelitian dan diperoleh lewat orang lain.²⁵ Data sekunder didapatkan dari data-data pendukung lalu diolah kembali. Data itu buku ataupun jurnal yang sesuai dengan teori terhadap penelitian yang dilakukan peneliti yakni Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui pengelolaan BUMDes.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan sebuah data yang dihasilkan dari beberapa percakapan atau penelitian dimana ada dua pihak yang melakukan percakapan yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.²⁶ Pihak yang akan diwawancara adalah 10 orang yang terbagi dari Ketua dan Bendahara BUMDES DKI JAYA, Kepala Desa serta Bendahara di Desa Duku Ilir, pengelola unit usaha BUMDes DKI JAYA serta masyarakat Desa Duku Ilir

²⁵ Syaifudin Azwar, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), hlm.91.

²⁶ Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian,(Jakarta:Rineka Cipta,2010),hlm.135.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data dengan hal-hal atau berupa catatan, dokumen, buku dan peraturan-peraturan dan juga catatan harian dan sebagainya.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Sumber data dari penelitian ini berupa data yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan tidak berwujud angka. Dengan kata lain, penelitian ini akan berisikan kutipan-kutipan data dan berarti kategori, tema serta pola berasal dari data untuk memberikan gambaran dari penyajian laporan tersebut.²⁸ Analisis data ialah mengatur urutan serta menstukturkannya pada satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Supaya dapat menemukan tema, serta mampu merumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.

Dengan penelitian kualitatif proses analisis data dikerjakan selama proses hingga penelitian selesai dikerjakan. Adapun pengumpulan dan analisis data dilaksanakan dengan teratur, yaitu analisis sudah dikerjakan sejak dilapangan, yakni dengan menyusun data menjadi suatu pola dan berbagai bagian secara cepat. Miles dan Huberman menyarankan analisis menggunakan tiga langkah analisis yaitu sebagai berikut :²⁹

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.65.

²⁸ Ahmadi Rulam, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 1 ed., 1 (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), hlm.234.

²⁹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Jl. Ekarasmi Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), hlm.189.

a. Reduksi Data

Yaitu proses penyaringan dan hanya terfokus pada menyederhanakan dan merubah data mentah yang dihasilkan dari dokumen yang ditulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Ialah suatu kegiatan saat beberapa informasi diubah, lalu dapat menarik sebuah kesimpulan dan melakukan tindakan. Pada penyajian data kualitatif berupa teks naratif yaitu catatan lapangan, grafik, jaringan dan tabel, matriks, agar mudah diakses dan memberikan kemudahan untuk melihat apa yang terjadi dan apakah kesimpulan itu benar atau sebaliknya.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti harus terus mencari dan mengelola data yang ada di lapangan untuk mencapai kesimpulan sejak peneliti turun ke lapangan. Kesimpulan ini adalah hal yang awalnya samar-samar dan terbuka, awalnya tidak jelas tapi menjadi lebih rinci dan alasan menjadi jelas.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu upaya dengan memberikan daya (*empowerment*) atau (*strengthening*) penguatan kepada masyarakat. Atau dalam kata lain pemberdayaan memiliki arti sebagai usaha yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan kreatifitas, kemandirian dan juga kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan suatu kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada dengan kegiatan atau dengan suatu program dengan adanya pendampingan. Pemberdayaan adalah memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dengan melakukan pengarahan, memberikan motivasi dan juga menggali semua potensi yang dimiliki hingga dapat membantu memenuhi kebutuhan.³⁰

Pemberdayaan dalam istilah diartikan dengan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola suatu kelembagaan masyarakat demi memperbaiki kehidupan. Dari penjelasan itu dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat ataupun individual baik itu perbaikan perekonomian.³¹

³⁰ Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.29.

³¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.28.

Menurut Zubaedi pemberdayaan adalah upaya dalam mendirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti masyarakat diperdayakan dengan melihat dan memilih sesuatu yang memiliki manfaat bagi dirinya.³²

Menurut Soetomo pemberdayaan merupakan suatu kegiatan dalam mengubah keadaan masyarakat yang standar hidupnya rendah dan membawanya pada kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya serta pada aspek sosial budaya dan juga politik. Pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, dan kesejahteraan tersebut adalah harapan dari semua pihak masyarakat ataupun negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan negara yang ideal adalah kesejahteraannya.³³

Menurut Suharto pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan juga tujuan. Pemberdayaan sebuah proses yang dimaksudkan adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat ataupun individu yang memiliki masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan adalah dengan adanya pemberdayaan diharapkan mengubah keadaan sosial, yaitu masyarakat yang memiliki suatu pengetahuan atau kekuasaan dan mampu memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik, ekonomi ataupun sosial seperti

³² Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007), hlm.24.

³³ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm.34.

menyampaikan pendapat, memiliki kepercayaan diri maupun pekerjaan, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial.³⁴

Menurut Direktorat Jendral pemberdayaan adalah upaya dalam menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik individu ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.³⁵

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan tentang defiinisi dari pemberdayaan masyarakat desa yaitu suatu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keterampilan serta pengetahuan, dan juga memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.³⁶

Dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan adalah memberikan suatu daya atau kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya dalam merubah dirinya baik secara individu ataupun berkelompok untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemberdayaan dalam bahasa arab yaitu *tamkin*, kata *tamkin* memiliki arti sebagai kemampuan untuk sesuatu kekuatan, pengaruh, kekuasaan, dan kedudukan baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan) atau bersifat *ma'nawi*. pengertian ini dalam bahasa ekonomi diartikan sebagai pemberdayaan, yaitu gambaran tentang pemberdayaan yang tidak dapat

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005),hlm.60.

³⁵ “Renstra (Rencana Strategis) tahun 2019, Direktorat Jenderal Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”.

³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

terlepas dari kekuasaan individu ataupun kelompok yang mempunyai atau mendapatkan kesempatan dalam mencapai kesuksesan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu sampai seterusnya.³⁷

Penjelasan diatas tentang pemberdayaan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kemampuan yang dimilikinya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat program yang ada yaitu BUMDes, merupakan suatu cara untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu membantu masyarakat yang kesulitan dalam permodalan untuk berwirausaha, memperkuat industri kecil yang dijalankan masyarakat supaya dapat membuka lowongan pekerjaan.³⁸

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan nilai sosial masyarakat, terkhusus masyarakat yang lemah dan tidak memiliki keberdayaan, baik kondisi eksternal ataupun internal. Terdapat tigakategori sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, yaitu:

- a. Lemah struktual, yaitu baik lemah secara kelas, gender ataupun etnis.

³⁷ Yulizar D, Sanrego, dan M. Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, cet. Pertama (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm.75.

³⁸ PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016, *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017* (PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016).

- b. Lemah khusus, yaitu manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, serta masyarakat terasing.
- c. Lemah personal, adalah mereka yang memiliki permasalahan pribadi atau keluarga.³⁹

Menurut Agus Syafi'i tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk mengembangkan diri kearah yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Yang berarti masyarakat memiliki kemampuan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Menurut Mardikanto, ada enam tujuan pemberdayaan masyarakat,⁴⁰ yaitu :

- a. Perbaikan kelembagaan, dilakukan dengan menjalankan suatu kegiatan dan diharapkan dapat merubah keadaan kelembagaan menjadi lebih baik termasuk dalam perluasan jaringan mitra usaha.
- b. Perbaikan usaha, menjalankan perbaikan seperti pendidikan, kelembagaan dan kegiatan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dijalankan.
- c. Perbaikan pendapatan, dengan adanya perbaikan terhadap bisnis yang dijalankan maka dapat memperbaiki jumlah

³⁹Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memeerdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: Pterfika Aditama, 2005), hlm.54.

⁴⁰Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.202.

pendapatan, termasuk pendapatan keluarga dan juga masyarakat.

- d. Perbaiki lingkungan, dengan bertambahnya pendapatan maka diharapkan dapat memperbaiki keadaan lingkungan baik lingkungan fisik dan sosial. karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas atau kemiskinan.⁴¹
- e. Perbaiki hidup, dengan bertambahnya jumlah pendapatan serta kondisi lingkungan yang semakin baik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaiki masyarakat, dengan kehidupan yang lebih baik serta didukung oleh kondisi lingkungan yang jauh lebih baik diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik.⁴²

3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat menurut Isbandi Rukminto Adi terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk keberhasilan pemberdayaan tersebut. Terdapat tujuh tahapan atau langkah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat,⁴³ yaitu sebagai berikut :

⁴¹ Totok, (2014),hlm.202.

⁴² Totok, (2014),hlm.203.

⁴³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),hlm.63.

a. Tahapan Persiapan

Tahap ini harus melakukan dua tahapan, yaitu penyimpanan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh *community worker*. Serta persiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan dan disiapkan secara *non-direktif*.

b. Tahapan Pengkajian

Tahapan ini adalah proses pengkajian yang dapat dilakukan pada masyarakat baik secara berkelompok atau individu. Pada tahapan ini para petugas diharuskan mengetahui ataupun mengidentifikasi masalah mengenai kebutuhannya serta sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba untuk melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang berbagai masalah yang dihadapi dan juga solusinya. Dalam hal ini masyarakat dapat berfikir tentang beberapa alternatif program yang efektif dan dapat dilakukan.

d. Tahap Pemformalisasi Rencana aksi

Tahap ini agen perubahan membantu masyarakat dalam merumuskan, merancang serta menentukan kegiatan atau program dalam penyelesaian permasalahannya. Serta petugas juga membantu untuk memformalisasikan semua gagasan kedalam

bentuk tertulis terutama jika itu berbentuk sebuah proposal kepada para penyandang dana.⁴⁴

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahapan dimana dalam mengupayakan pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat peran dari masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan karena diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang dijalankan dan yang telah dikembangkannya. Adanya kegiatan kerja sama antara petugas dan masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan program yang telah dirancang sebelumnya dan mengantisipasi jika program tersebut tidak sesuai dilapangan.

f. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi yaitu sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dalam jangka waktu yang pendek mampu membentuk suatu kelompok dalam melakukan pengawasan secara internal serta dalam jangka panjang dapat membantu komunikasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

⁴⁴ Isbandi, (2013), hlm.63.

g. Tahap Terminasi

Ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, dalam tahap ini program diharapkan segera berakhir.⁴⁵

Dari penjelasan diatas mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat diatas dapat ditegaskan bahwa pada proses pemberdayaan diperlukan beberapa tahapan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan. Tahap itu dimulai dari masyarakat itu sendiri yakni dengan penyadaran serta menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berubah hingga mencapai kemandirian. Masyarakat akan merasakan perekonomian yang mandiri serta maju jika pemberdayaan masyarakat ini berhasil atau mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian melalui pengelolaan BUMDes dapat membantu mengubah perekonomian masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dengan tahap-tahap dalam proses pemberdayaan.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Ekonomi Masyarakat

Dalam bahasa Yunani kata ekonomi yaitu “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang memiliki arti sebagai kaidah, aturan atau pengelolaan. Dan secara sederhana ekonomi diartikan sebagai suatu akidah, aturan atau cara dalam mengelola suatu rumah tangga. Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi sering disebut *al-iqtishad* yang berarti hemat.

⁴⁵ Isbandi, (2013), hlm.65.

Sedangkan secara terminologi ekonomi diartikan sebagai pengetahuan tentang persoalan mengenai upaya kelompok atau individu dalam memenuhi kebutuhan.⁴⁶ Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat ialah mengatur tentang urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan ataupun distribusi.⁴⁷

Ekonomi rakyat dalam konteks permasalahan sederhana adalah strategi “bertahan hidup” dan dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik didesa maupun kota.⁴⁸ Meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi diartikan sebagai usaha dalam mengelola rumah tangga sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, adapun kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Ekonomi masyarakat merupakan suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat merupakan beberapa rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sekitar dengan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia, yang disebut sebagai usaha dan menengah terutama meliputi sektor

⁴⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm.2-3.

⁴⁷ M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3.

⁴⁸ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Progam IDT* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm.4.

pertanian, perkebunan, kerajinan, makanan dan lain sebagainya. Tujuan dari perekonomian yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu mensejahterakan serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Jika terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan terciptanya kelangsungan hidup yang produktif.⁴⁹

2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses dalam meningkatkan kekuatan masyarakat untuk menjalankan kegiatan perekonomian terkhususnya dengan memberikan motivasi, mendorong, serta menggali semua potensi yang dimiliki, sehingga mampu mengubah suatu kondisi yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dengan adanya tindakan secara nyata untuk meningkatkan harta ataupun martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan serta keterbelakangan.⁵⁰

Pemberdayaan ekonomi terwujud jika fokus dan tepat sasaran dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mampu mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hal dapat dilakukan dalam penguatan pemberdayaan ekonomi yakni dengan cara penguatan pada pengetahuan dan juga keterampilan, memperoleh informasi, memperoleh gaji atau upah, distribusi dan pemasaran, sebagai

⁴⁹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm.24.

⁵⁰ Darwanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 12 No.13 (2016), hlm.68.

upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ataupun individu supaya mampu untuk mandiri.⁵¹

Penjelasan diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa, pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah proses untuk merubah kondisi perekonomian ataupun keadaan sosial masyarakat baik secara kelompok ataupun individu untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

3. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hutomo, ada empat faktor pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat,⁵² yakni sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Adalah faktor terpenting pada program pemberdayaan ekonomi, maka dari itu diperlukan adanya pengembangan terhadap sumber daya manusia. Dalam pengembangannya juga diperlukan penanganan yang serius, karena sumber daya manusia adalah unsur paling fundamental atau dasar dalam penguatan ekonomi.

b. Sumber Daya Alam

Ialah yang dalam proses pemberdayaan ekonomi memiliki merupakan sumber daya pembangunan yang terpenting, karena sumber daya alam adalah sesuatu yang mampu dimanfaatkan dalam hal memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

⁵¹ Andreas, dkk, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial* (Medan: Raja Garuda, 2016), hlm.23.

⁵² Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi* (Jakarta: Bappenas, 2000), hlm.2.

c. Permodalan

Permodalan merupakan aspek yang sering ditemui oleh masyarakat. Tetapi ada hal yang harus dicermati dalam aspek permodalan, yaitu cara pemberian modal supaya tidak mengakibatkan ketergantungan, serta mampu mendorong UMKM menjadi jauh lebih berkembang. Cara yang dianggap cukup baik dalam permasalahan permodalan ialah dengan menjamin kredit di lembaga keuangan ataupun memberikan subsidi bunga atas pinjaman di lembaga keuangan.⁵³

d. Prasarana Produksi dan Pemasaran

Sebagai pendorong produktifitas dan tumbuhnya suatu usaha aspek ini sangat dibutuhkan. Kegiatan produksi akan dianggap sia-sia jika tidak mampu memasarkan produknya. Itulah sebab tersedianya prasarana produksi dan pemasaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan penerimaan masyarakat dan juga UMKM akan terjadi jika tersedianya alat transportasi dari tempat produksi kepasar untuk mengurangi rantai pemasaran.⁵⁴

4. Konsep Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan dilakukan karena suatu permasalahan yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan obyek utama dalam pemberdayaan. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk

⁵³ Hutomo, (2000),hlm.2.

⁵⁴ Hutomo, (2000),hlm.3.

mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut terdapat sikap yang memiliki pengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi dan melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Dengan adanya kebijakan yang salah pada pembangunan ekonomi maka terjadilah ketidak merataan pembangunan dari konsep keadilan sosial yang tidak tepat sasaran. Dalam hal mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial terdapat beberapa hal yang mendasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman konsep islam kembali dan mengarah pada perkembangan sosial masyarakat konsep agama yang dipahami oleh umat islam saat ini sangat individual.
- b. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep perubahan sosial budaya. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi tentang sosial budaya untuk mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsep islam.⁵⁵

Islam beranggapan suatu pemberdayaan tidak berfokus pada sektor perekonomian saja. Untuk mengatentaskan kemiskinan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita cara, yakni melalui perdagangan dan juga Peternakan. Berdasarkan konsep pemberdayaan yang di contohkan oleh Rasulullah SAW, bukan pada “penghapusan kemiskinan” akan tetapi seperti memberikan bantuan yang bersifat sementara.

⁵⁵ Muhammad Ashari, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 20 Juni 2009.

Rasulullah dalam mengatasi permasalahan perekonomian yang terjadi bukan hanya memberikan nasehat, tetapi beliau memerintah masyarakat untuk dapat mengelola dengan baik sumber daya yang telah tersedia sehingga masyarakatnya mampu untuk mengatasi permasalahannya. Konsep pemberdayaan dalam islam ialah bersifat menyeluruh serta melibatkan berbagai aspek kehidupan.⁵⁶

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material ataupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam Qs. Fussilat:10 yaitu:

وَجَعَلَ فِيهَا رُوسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرُكَّ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ

Artinya: “Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan”. (QS. Fussilat ayat 10).⁵⁷

⁵⁶ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.215.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Republik Indonesia*, Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

5. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Al-Quran

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi terkandung pada alQur'an surat Al- A'raf ayat 10 bahwa manusia bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini menjelaskan keterkaitan mengenai tamkim (pemberdayaan) yaitu manusia telah diciptakan oleh Allah SWT di bumi agar berusaha.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ء

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A'raf : 10)⁵⁸

Dalam surat diatas Allah telah berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Allah menciptakan bumi dan didalamnya terdapat semua kebaikan, usaha dan manfaat yang dijadikan kehidupan mereka. Maksud Allah menciptakan manusia di bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber daya yang dijadikan penghidupan manusia yang diciptakan Allah harus dipergunakan secara bijak, bukan dipergunakan secara semena-mena atau dihambur-hamburkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI.

⁵⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.340.

b. Hadits

Hadits dibawah ini menjelaskan tentang saling tolong menolong dan membantu kaum-kaum yang tidak berdaya yaitu orang miskin. Orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang tidak dapat menjalankan kehidupannya untuk lebih baik. Hadist dibawah ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan yang memiliki arti adalah sebagai berikut :

“Dari Abu Dzar RA, ia berkata. “Rasulullah SAW bersabda, (Nisab) saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka.” (HR. Ibnu Majah)⁶⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa menjadi pemimpin harus memberikan suatu kelayakan kepada orang-orang yang dipimpinnya bahkan memberikan yang sesuai ia pakai dilihat dari kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan di bawah tangan kalian”. Kaitannya dengan hal pemberdayaan ekonomi yaitu seorang pemimpinlah yang akan memberikan kebijakan dalam progam pemberdayaan tersebut sehingga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak memberatkan rakyatnya.

⁶⁰ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*.

C. Tinjauan Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.

Adapun pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang dikutip dari buku Fory A. Nawai yaitu, Menurut Alam ia mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Menurut Suprianto dan muhsin, pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan. Sedangkan menurut Kiyosaki dan Lechter bahwa, pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan yang paling utama adalah pengelolaan informasi. dan Sudirman menyatakan bahwa, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota. Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen yang berarti juga pengaturan atau perumusan.⁶¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Serta

⁶¹ Fory A. Nawai, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm.10-11.

dapat dikatakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengorganisasian manusia, keuangan, fisik dan juga dan juga informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Jika pengelolaan sumber daya yang terdapat pada desa dilakukan dengan baik dan bersama BUMDes diharapkan mampu membantu serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

D. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Secara etimologi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang berarti hukum atau yuridis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba, adapun kata milik berarti kepemilikan sementara, serta desa merupakan satu kesatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Oleh sebab itu, BUMDes ialah suatu usaha yang dilakukan sistem pemerintahan yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa dengan upaya memperkuat perekonomian yang ada di desa serta membangun kerekatan dalam hubungan sosial masyarakat yang terbentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁶²

⁶² Maryunani, *Pembangunan BUMDes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hlm.35.

BUMDes menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Jadi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan suatu usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil atau keuntungan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 mengatur mengenai BUMDes , bahwa desa mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan ataupun potensi yang terdapat di desa. Oleh sebab itu BUMDes bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut juga diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa,yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes.⁶³

BUMDes adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, tetapi dalam kegiatan operasionalnya diluar wewenang pemerintah desa. Walaupun begitu BUMDes dan pemerintah desa bertugas untuk bekerja sama untuk menjalankan program dalam mencapai tujuan pendirian BUMDes itu sendiri. Masyarakat sangat mendukung suatu BUMDes itu berdiri dan bertahan, karena masukan serta masyarakat itu sendiri sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah unit usaha. Adapun

⁶³ Amelia Kusuma, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya Dalam Meningkatkan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Jurnal Hukum* Vol.5 No.1 (2014),hlm.2.

pemerintah desa berperan sebagai pelindung dengan regulasi yang jelas untuk keberadaan BUMDes.⁶⁴

Pendirian BUMDes ialah untuk mengelola potensi secara efektif dan juga efisien, serta mampu mengoptimalkan pemberdayaan kepada masyarakat. Dan tujuan utamanya yakni mencari keuntungan ekonomi (*profit oriented*) dan nantinya manfaat itu dapat dirasakan masyarakat. Kehadiran BUMDes bukanlah untuk menguasai kegiatan ekonomi yang telah dijalankan oleh masyarakat akan tetapi mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang baru, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan lebih mempertimbangkan aspek kebutuhan dan juga potensi desa. Hal ini tentunya dapat menjadikan usaha yang dibangun masyarakat lebih produktif dan efektif.⁶⁵

Dapat diartikan dari beberapa pengertian BUMDes yang telah dibahas bahwa BUMDes adalah lembaga pemerintah yang dikelola oleh masyarakat untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat terutama masyarakat desa. Serta masyarakat akan berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian desa dan juga lingkungan desa. BUMDes menjadi salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa, maka harus memiliki perbedaan lembaga ekonomi pada umumnya. Dimaksudkan keberadaan BUMDes maupun

⁶⁴ Mohammad Najib, *BUMDES: Pembentukan dan Pengelolaannya* (Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), hlm.52-53.

⁶⁵ Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm.9-10.

kinerja BUMDes sendiri mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan ekonomi desa, dalam peraturan perundangundangan tentang desa menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakasa desa dalam gerakan usaha ekonomi. Dalam peraturan sistem hukum, Legitimasi Yudiris dalam bentuk Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tercantum didalam peraturan Bupati tentang:

- a. Pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan lokasi desa.
- b. Penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan Lokal Berskala desa dibidang pemerintahan desa.

Langkah selanjutnya yaitu penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskal Desa yang menggambar isi Peraturan Bupati atau Walikota dengan memasukan pendirian, dan pengelolaan BUMDes. Baik Peraturan Bupati atau Walikota maupun Perdes tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal 21 usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memuat BUMDes harus

sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan.⁶⁶

Berikut adalah syarat pembentukan BUMDes menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010:⁶⁷

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa
- b. Adanya potensi usaha masyarakat
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.⁶⁸

Pembentukan BUMDes harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa, dan masyarakat

⁶⁶ Eko Sri Haryanto dan dkk, *Pengembangan Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.17.

⁶⁷ Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

⁶⁸ Permendagri, (2009).

kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDes. Mekanisme pembentukan BUMDes ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang pendirian BUMDes.

Setelah segala persyaratan pendirian BUMDes sudah terpenuhi, kemudian BUMDes disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia.⁶⁹ Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usahanya masyarakat di desa
- b. Memperdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan perekonomian desa
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan pengatan ekonomi di desa.⁷⁰

3. Landasan Hukum BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berdiri berdasarkan landasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

⁶⁹ Permendagri, (2009).

⁷⁰ Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm.13.

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.⁷¹

Dalam UU Desa terdapat ketentuan jaminan desa dapat mendirikan BUMDes juga terdapat ketentuan terkait jenis layanan BUMDes seperti termaktub dalam Pasal 87 ayat 3 jelas disebutkan, ruang usaha yang bisa dilakukan BUMDes adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan pelayanan umum. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.⁷²

4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Adapun tujuan pembentukan BUMDes sebagai berikut:

- a. Untuk Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- b. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷² Muhammad Yasin dan dkk, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015), hlm.401-402.

- c. Meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- d. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- e. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.⁷³

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa adanya BUMDes guna meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Maksud dari BUMDes sebagai lembaga sosial yaitu dimana BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal bisa barang atau jasa ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas perundang-undangan harus berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk dari BUMDes dapat berbeda di setiap desa di Indonesia Keragaman ini terbetuk karena karakteristik lokal, potensi, maupun sumberdaya yang di miliki pada tiap desa.

5. Prinsip Tata Kelola BUMDes

Secara garis besar tata kelola BUMDes diatur dalam Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Di jelaskan bahwa

⁷³ Yasin dan dkk, (2015),hlm.391.

dalam peraturan tersebut pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Di dalam BUMDes sekurang-kurangnya adalah terdiri dari komisariss atau penasihat dimana dijabat oleh Kepala Desa dan ketua BPD, dan untuk pelaksanaan operasional atau direksi dijabat oleh ketua LPMD dibantu staf.

Terdapat beberapa prinsip lagi yang harus dipatuhi dalam pengelolaan BUMDes, adalah sebagai berikut :

- a. Kooperatif, dimana semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, dimana aktifitas yang mempengaruhi masyarakat dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat dengan terbuka dan mudah.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.⁷⁴

Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan atau menjalin semua kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga akan menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.⁷⁵

6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan “Usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti antara lain:⁷⁶

a. *Serving*

BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan *social benefits* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh usaha serving yaitu usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.

b. *Banking*

BUMDes menjalankan “bisnis uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih

⁷⁴ Ar Royyan dan dkk, *Ekonomi Desa* (Banda Aceh: Natural Aceh, 2018), hlm.27.

⁷⁵ Ar Royyan dan dkk, (2018), hlm.32-33.

⁷⁶ Muhammad Yasin dan dk, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015), hlm.411.

rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa dan bank-bank konvensional. Contoh usaha banking yaitu bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir.

c. Renting

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh usaha renting yaitu penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. Brokering

BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha brokering yaitu jasa pembayaran listrik, PDAM, telepon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. Trading

BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

Contoh usaha trading yaitu pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian.

f. Holding

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha *Holding* dalam kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan.⁷⁷

E. Kerangka Pikir

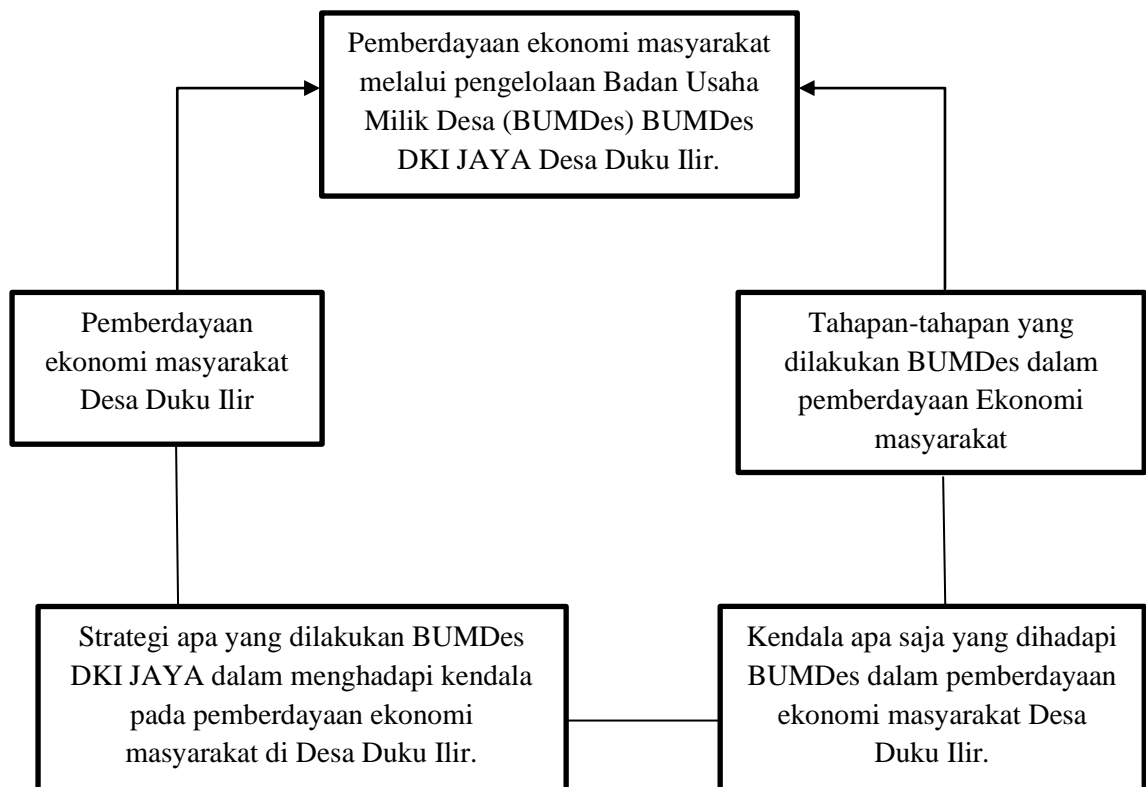
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Duku Ilir belum terealisasi, hal tersebut karena banyak potensi desa ataupun keahlian masyarakat desa belum dimanfaatkan atau dikelola dengan baik sehingga belum mampu menjadikan keahlian ataupun potensi yang dimiliki sebagai nilai ekonomi. BUMDes DKI JAYA seharusnya mampu mengembangkan serta menjadikan potensi alam serta masyarakat Desa Duku Ilir sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ekonominya, sebagaimana tujuan utama pembentukan BUMDes itu sendiri sebagai lembaga yang mengelola serta menjadikan potensi sebagai suatu upaya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta tujuan utama pendirian BUMDes yakni sebagai lembaga untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam penelitian ini

⁷⁷ Anom Surya, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.32.

berfokus untuk merumuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan supaya dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Duku Ilir melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes DKI JAYA), yang mana pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tujuan utama dalam pendirian BUMDes di Desa Duku Ilir. Serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi serta strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes DKI JAYA.

Gambar kerangka pikir dibawah ini yang digunakan untuk merumuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi kasus BUMDes DKI JAYA Desa Duku Ilir, Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu).

Gambar 1.2
Skema Kerangka Pikir



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Duku Ilir

1. Letak Geografis

Desa Duku ilir merupakan desa di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Indonesia. Desa yang terletak diantara sungai dan perkebunan, masyarakat Desa Duku Ilir mayoritas berprofesi sebagai petani dan juga peternak, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta. Adapun Jumlah total keseluruhan penduduk Desa Duku Ilir adalah 927 jiwa. Adapun luas wilayah Desa Duku Ilir 412 Ha yang terbagi dengan luasnya persawahan dan terbagi dari 2 dusun. Secara geografis Desa Duku Ilir, dilihat dari beberapa aspek tinjauan sebagai berikut:

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1). Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Seguring
- 2). Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kesambe Lama
- 3). Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kampung Delima
- 4). Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Duku Ulu.⁷⁸

Masyarakat Desa Duku Ilir tergolong masyarakat yang produktif dan giat bekerja, dimana hal ini menjadi tanda baik yang akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa dengan catatan masyarakat

⁷⁸ Data Penduduk Desa 2022, Desa Duku Ilir, hlm.18.

tersebut benar-benar diberdayakan dengan baik melalui program kerja BUMDes sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.⁷⁹

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan bahwa mayoritas masyarakat Desa Duku Ilir dahulunya hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Karena biaya pendidikan yang tinggi dan mahal menjadi kendala atau permasalahan bagi masyarakat kurang mampu. Selain biaya, ada beberapa faktor yang menjadi kendala seperti keterbatasan ekonomi, jarak sekolah yang jauh, dan sebagainya. Tetapi saat ini masyarakat desa sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya dan bekerja keras untuk keberhasilan anak-anak mereka sebagai generasi penerus bangsa dan pembawa perubahan bagi Desa Duku Ilir.

2. Sejarah Desa Duku Ilir

Penduduk Desa Duku Ilir berasal dari beberapa suku yaitu suku Rejang, Jawa dan lembak, dan masyarakatnya bersuku rejang. Desa Duku Ilir adalah desa yang terbentuk oleh anak dari Biku Sungai Tuo yang berlokasi di ujung desa ini sekarang, desa ini berdiri sendiri tidak dari pecahan ataupun pemekaran dari desa-desa lainnya. Dengan jumlah penduduk yang masi sedikit mereka hidup bergantung dengan alam, ketika pertama kali desa ini hendak berkembang datanglah sebuah hama penyakit menular dan mengakibatkan banyak orang meninggal baik dewasa ataupun anak-anaknya. Sehingga akhirnya penduduk pindah

⁷⁹ Adam Khalik, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2023, Pukul 14:25 Wib

menyeberangi sungai yang berdekatan dengan desa ini sekarang, hingga terjadi keributan perebutan daerah yang membuat keributan antar tetangga. Lalu masyarakat kembali pindah ke lokasi sedikit lebih maju ke depan hingga akhirnya masyarakat dapat tumbuh dan berkembang hingga sekarang.⁸⁰

B. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) DKI JAYA

1. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) DKI JAYA

BUMDes DKI JAYA pertama kali dibentuk pada kamis, 10 Juni 2015. Rapat pembentukan dilakukan dibalai Desa Duku Ilir dan dihadiri sekitaran 15 peserta terbagi dari pemerintah desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat.⁸¹

Perjalanan awal BUMDes DKI JAYA pada periode tahun 2015-2016 merupakan masa pembentukan, dimana belum ada kegiatan koordinasi maupun penyertaan modal dikarenakan pada saat itu konsentrasi Dana Desa adalah untuk pembangunan. Pertengahan bulan November tahun 2017 merupakan masa konsolidasi pengurus, pada masa ini telah terjalin komunikasi yang baik antar pengurus dan mulai merencanakan program usaha meskipun masih sederhana, dianggap sebagai tahap pembelajaran yang baik untuk menumbuhkan dinamika kepengurusan BUMDes serta fokus pengembangan usaha. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kemudian diajukan penyertaan modal dari Dana

⁸⁰ Adam Khalik, (2023).

⁸¹ Dedi Saputra, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2023, pukul 14:00 Wib.

Desa Duku Ilir sebesar 25.000.000 untuk mendirikan beberapa unit usaha beserta sarana pendukungnya.⁸²

Tahun 2018-2020 merupakan masa menuju pematapan pengurus dengan melakukan berbagai pertemuan dan konsolidasi yang dilakukan secara berkelanjutan, dan pada akhirnya mengajukan penyertaan modal sebesar 50.000.000 yang digunakan untuk pendirian unit usaha pembuatan kue dan alumunium dan penyewaan tenda. hingga tahun 2020 BUMDes DKI JAYA telah berkembang dengan bertambahnya beberapa unit usaha seperti, peternakan kambing dan peternakan ikan.⁸³

Tahun 2021-2023 merupakan masa perpindahan jabatan dimana pengurus terdahulu mengundurkan diri dan menyerahkan BUMDes DKI JAYA kepada pihak pemerintah Desa DUKU Ilir, sehingga pada tanggal 05 Februari 2021 dibentuk dan disahkan pengurus baru BUMDes DKI JAYA oleh pihak pemerintah desa dan masyarakat.⁸⁴

2. Visi dan Misi BUMDes DKI JAYA

Visi, Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Duku Ilir melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan moto mari bersama membangun desa.⁸⁵

Misi, Adapun beberapa misi-misi BUMDes DKI JAYA sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal.

⁸² Dedi Saputra, (2023).

⁸³ Dedi Saputra, (2023).

⁸⁴ Dedi Saputra, (2023).

⁸⁵ Laporan Tahunan BUMDes DKI JAYA, Desa Duku Ilir, hlm.67.

- 2) Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan professional.
- 4) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui unit usaha yang dibentuk BUMDes DKI JAYA.
- 5) Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pengembangan berbagai kerajinan industri rumah tangga.
- 6) Membantu mengelola program pembangunan desa terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 8) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.⁸⁶

3. Bentuk dan Fungsi BUMDes DKI JAYA

Bentuk BUMDes DKI JAYA, berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalasi melalui peraturan desa.

Adapun Fungsi BUMDes DKI JAYA, berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa Duku Ilir.⁸⁷

⁸⁶ Laporan Tahunan, hlm.68.

⁸⁷ Laporan Tahunan, hlm.72.

4. Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan BUMDes DKI JAYA berdasarkan SK Kepala Desa No. 03/II/2021 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris : Kepala Desa Duku Ilir
2. Pelaksana Operasional :
 - a. Direktur : Dedi Saputra
 - b. Sekretaris : Suci Indah Sari
 - c. Bendahara : Evita
 - d. Unit-unit Usaha
 - 1). Kepala Unit Usaha : Noviar Evendi
 - 2). Kepala Unit Usaha : Fauzar Putra Utama
3. Pengawas
 - a. Ketua : Zul Andri
 - b. Wakil Ketua : Adam Cholik
 - c. Anggota : Erlina⁸⁸

5. Jenis Usaha BadanUsaha Milik Desa DKI JAYA

1. Pembuatan Kue

Adalah unit usaha yang dijalankan oleh ibu-ibu PKK Desa Duku Ilir dengan membuat kue untuk pesanan acara, kue untuk pesta, dan lain sebagainya.

⁸⁸ SK Kepala Desa No. 03/II/2021, Desa Duku Ilir, Curup Timur.

2. Alumunium

Adalah unit usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang memiliki keahlian dalam membuat lemari, akuarium atau peralatan rumahan dengan menggunakan kaca dan bahan alumunium.

3. Sewa Tenda

Adalah unit usaha yang dijalankan oleh anggota BUMDes yakni usaha penyewaan alat-alat tenda yang digunakan untuk acara yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Duku Ilir baik acara hajatan, orang meninggal ataupun acara lainnya.

4. Peternakan Kambing

Unit usaha peternakan kambing dijalankan oleh 15 anggota dengan program pengembangan dan peternakan kambing. Diberikan kepada masyarakat yang memiliki keahlian dalam beternak dan memiliki perekonomian yang kurang mampu.⁸⁹

⁸⁹ Laporan Tahunan BUMDes DKI JAYA, Desa Duku Ilir, hlm.83.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang diperlukan. Pada penelitian yang peneliti lakukan terhadap Ketua BUMDes DKI JAYA beserta pemerintah desa dan masyarakat Desa Duku Ilir. Peneliti telah mendapatkan data tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes di Desa Duku Ilir.

Untuk lebih jelas dan rinci dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab 1, yaitu untuk mengetahui tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes DKI JAYA serta kendala yang dihadapi BUMDes DKI JAYA dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan strategi dalam menghadapi kendala pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir. Untuk itu disusun pedoman wawancara, yang digunakan untuk mengintrensikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pengelolaan BUMDes DKI JAYA Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Duku Ilir

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian diatas maka diajukan beberapa pertanyaan kepada informan adapun

jumlah informan yang diwawancara sebanyak 10 orang, adapun beberapa informan tersebut adalah: Bapak Dedi Saputra sebagai ketua BUMDes DKI JAYA, Ibu Evita sebagai bendahara BUMDes DKI JAYA, Bapak Adam Khalik sebagai Kepala desa Duku Ilir, Ibuk Yuni sebagai bendahara Desa Duku Ilir. Ibu Sulastri sebagai pengelola unit usaha kue, Bapak Zul Andri sebagai pengelola unit usaha alumunium, Bapak Erwin perwakilan pengelola peternakan kambing, dan Bapak Raden yang mengelola unit usaha sewa tenda. Serta Bapak Rike dan Ibu Yunita sebagai perwakilan masyarakat Desa Duku Ilir. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada para informan sebagai berikut. Bagaimana pihak BUMDes mempersiapkan masyarakat Desa Duku Ilir yang akan menjalankan program BUMDes tersebut. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Untuk pelaksanaan unit usaha keperluan operasionalnya sudah disediakan oleh pihak BUMDes DKI JAYA sehingga masyarakat hanya perlu menjalankan program itu dengan baik.”⁹⁰

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Evita sebagai Bendahara BUMDes DKI JAYA:

“Iya, untuk keperluan operasional masyarakat dalam menjalankan program BUMDes sudah disiapkan oleh kami agar masyarakat mudah menjalankannya.”⁹¹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Adam Khalik selaku Kepala Desa di Desa Duku Ilir:

“Sepengetahuan saya semua kebutuhan operasional dalam menjalankan unit usaha sudah disediakan dan disiapkan pihak

⁹⁰ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

⁹¹ Evita, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 15: 45 Wib.

BUMDes dan masyarakat hanya perlu menyiapkan diri dan tenaga mereka.”⁹²

Dari jawaban Bapak Adam Khalik pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Yuni selaku Bendahara Desa Duku Ilir:

“Saya rasa iya, karena dalam laporannya terdapat anggaran dana BUMDes DKI JAYA untuk programnya sudah ada nominal untuk biaya operasionalnya.”⁹³

Dari jawaban Ibu Yuni ditambahkan pendapat dari Ibu Sulastri sebagai pengelola unit usaha pembuatan kue:

“Kami yang menjalankan programnya hanya perlu menyiapkan tenaga dan sedikit modal tambahan untuk membeli keperluan lainnya seperti membeli cetakan kue, dan alat-alat yang kecil-kecil untuk membuat kue.”⁹⁴

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Zul Andri sebagai pengelola unit usaha alumunium:

“Alhamdulillah semua alat untuk operasionalnya sudah disediakan dan dipersiapkan oleh pengelola BUMDes sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan usaha alumunium ini.”⁹⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Raden sebagai pengelola unit usaha sewa tenda:

“Saya sebagai pengelola unit sewa tenda hanya perlu mencatat dan menerima biaya sewa tenda. Semua alat tenda yang disewakan merupakan milik BUMDes DKI JAYA”⁹⁶

Pendapat serupa juga disampaikan oleh, Bapak Darwin sebagai masyarakat pengelola unit usaha peternakan kambing:

⁹² Adam Khalik, *wawancara*, tanggal 17 Juni 2023, pukul 16.20 Wib.

⁹³ Yuni, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 15:45 Wib.

⁹⁴ Sulastri, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:50 Wib.

⁹⁵ Zul Andri, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 16:00 Wib.

⁹⁶ Raden, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 16:20 Wib.

“Untuk kambingnya itu kami sudah diberikan oleh BUMDes, kami hanya perlu membuat kandang untuk kambingnya dan mengembangbiakan kambing itu saja.”⁹⁷

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan diatas bisa kita lihat bahwa pihak BUMDes DKI JAYA telah mempersiapkan dengan baik beberapa masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dalam menjalankan programnya, baik itu dari segi moril dan juga perlengkapan operasionalnya sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memulai programnya dengan BUMDes DKI JAYA. Bagaimana Pihak BUMDes dapat mengetahui potensi serta kebutuhan masyarakat Desa Duku Ilir. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Kami tidak dapat mengetahui sepenuhnya potensi dan kebutuhan masyarakat karena dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes hanya beberapa masyarakat yang berperan dan dalam melakukan rapat hanya ada beberapa perwakilan masyarakat yang diundang dikarenakan keterbatasan biaya pihak BUMDes untuk mengundang dan mengumpulkan masyarakat Desa Duku Ilir.”⁹⁸

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Evita sebagai Bendahara BUMDes DKI JAYA:

“Seharusnya kami pihak BUMDes dapat mengetahui potensi desa serta kebutuhan masyarakat, tetapi untuk mengetahui itu kami harus melakukan rapat bersama masyarakat. Sedangkan untuk mengumpulkan masyarakat dibutuhkan dana walaupun tidak besar tetapi pihak BUMDes tidak memiliki dana tersebut.”⁹⁹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Adam Khalik selaku Kepala Desa:

⁹⁷ Darwin, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023. Pukul 16:35 Wib.

⁹⁸ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

⁹⁹ Evita, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 15:30 Wib.

“Seharusnya iya, mungkin karena keterbatasan biaya sehingga hanya beberapa masyarakat yang diundang sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tidak diundang dalam rapat BUMDes sehingga tidak dapat menyampaikan kebutuhan ataupun idenya tentang pengelolaan potensi didesa ini, mungkin mereka tidak tahu kalau itu rapat terbuka dan masyarakat bisa mengikutinya.”¹⁰⁰

Hal serupa juga disampaikan Bapak Rike sebagai masyarakat Desa Duku

Ilir:

“Menurut saya pihak BUMDes kurang mampu mengetahui kebutuhan serta potensi pada desa ini, karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang hal-hal yang dilakukan BUMDes untuk mereka. Hal tersebut mungkin terjadi karena pihak BUMDes hanya mengundang beberapa masyarakat saja dalam rapat itu.”¹⁰¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yunita sebagai masyarakat Desa

Duku Ilir:

“Menurut saya BUMDes DKI JAYA belum melihat potensi desa serta masyarakat, karena dalam kegiatannya pihak BUMDes DKI JAYA belum melibatkan semua masyarakat terutama anak muda desa ini.”¹⁰²

Berdasarkan jawaban dari para informan dapat kita simpulkan bahwa tidak sepenuhnya pihak BUMDes melihat potensi yang terdapat di Desa Duku Ilir dan juga kebutuhan masyarakat desa. Hal tersebut terjadi karena pihak BUMDes yang hanya mengundang beberapa perwakilan masyarakat kedalam rapat sedangkan hanya ada beberapa perwakilan saja yang datang, tetapi masyarakat lainnya yang ingin menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka merasa canggung untuk datang dalam rapat terbuka, sehingga mereka tidak mampu

¹⁰⁰ Adam Khalik, *wawancara*, tanggal 17 Juni 2023, pukul 16.20 Wib.

¹⁰¹ Rike, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 19:05 Wib.

¹⁰² Yunita, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 18.45 Wib.

menyampaikan aspirasi dalam mengelola potensi desa serta menyampaikan kebutuhannya melalui BUMDes DKI JAYA. Serta pihak BUMDes tidak melibatkan anak muda desa sebagai upaya pengembangan potensi desa, karena anak muda adalah generasi penerus desa serta mereka mampu melihat serta mendayagunakan potensinya dan sumber daya alam yang terdapat di Desa Duku Ilir ini, dengan harapan BUMDes DKI JAYA bersama anak muda masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Apakah dalam setiap perencanaan programnya BUMDes melibatkan masyarakat. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Iya dalam perencanaan program kami melibatkan masyarakat tapi hanya beberapa, seperti yang telah saya jelaskan tadi karena keterbatasan biaya sehingga hanya beberapa masyarakat yang kami undang. Dan biasanya rencana program dengan hasil suara terbanyak dari mereka itu yang akan dipertimbangkan untuk dijalankan oleh pihak BUMDes DKI JAYA.”¹⁰³

Pendapat serupa juga disampaikan Bapak Rike sebagai salah satu masyarakat Desa Duku ilir:

“Seharusnya iya, pihak BUMDes juga sudah mengundang masyarakat dalam rapat perencanaan programnya mungkin karena biayanya tidak ada ya, sehingga menurut saya kurang efektif karena hanya beberapa masyarakat saja yang bisa menyampaikan pendapat mereka kepada pihak BUMDes DKI JAYA untuk menjadi program kedepannya.”¹⁰⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yunita masyarakat di Desa Duku Ilir:

¹⁰³ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

¹⁰⁴ Rike, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 19:05 Wib.

“Seharusnya pihak BUMDes melibatkan masyarakat dalam merencanakan programnya, karena jika programnya tidak sesuai dengan keahlian masyarakat mana bisa program itu bertahan.”¹⁰⁵

Berdasarkan jawaban informan bahwa BUMDes DKI JAYA tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Duku Ilir dalam melakukan kegiatan perencanaan terhadap program BUMDes kedepannya untuk dapat melihat seluruh potensi yang ada serta dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, hal tersebut terjadi karena hanya beberapa masyarakat saja yang diikut sertakan dalam perencanaan programnya. Bagaimana pihak BUMDes menyikapi gagasan yang diberikan masyarakat dalam mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat desa. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Kami pihak BUMDes menerima dengan sangat baik ide yang diberikan masyarakat tentang program ataupun saran untuk BUMDes DKI JAYA, lalu ide tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk program yang akan datang.”¹⁰⁶

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Bapak Raden sebagai pelaksana unit usaha sewa tenda BUMDes DKI JAYA:

“Untuk ide ataupun gagasan diterima baik oleh pihak BUMDes, tapi jika untuk perencanaan programnya tidak sesuai dengan yang disampaikan masyarakat dalam rapat.”¹⁰⁷

Pendapat serupa juga disampaikan Bapak Rike sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

“Biasanya pihak BUMDes menerima dengan baik ide yang kami sampaikan, baik dalam rapat ataupun disaat mengobrol bersama ketua BUMDesnya.”¹⁰⁸

¹⁰⁵ Yunita, wawancara, tanggal 26 Juli 2023, pukul 18.45 Wib.

¹⁰⁶ Dedi Saputra, wawancara, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

¹⁰⁷ Raden, wawancara, tanggal 26 Juli 2023, pukul 16:45 Wib.

¹⁰⁸ Rike, wawancara, tanggal 16 Juni 2023, pukul 19:05 Wib.

Pendapat yang lainnya juga disampaikan oleh Ibu Yunita sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

“Menurut saya, pihak BUMDes memang seakan menerima dengan baik pendapat yang disampaikan masyarakat, namun kenyataannya masi keputusan mereka yang dijadikan program bukan yang disampaikan masyarakat. Hal itu juga yang membuat masyarakat terutama saya agak malas untuk ikut rapat itu lagi.”

Berdasarkan jawaban diatas bahwa pihak BUMDes DKI JAYA dapat menerima dengan baik untuk setiap ide dan juga gagasan dalam upaya mengatasi permasalahan masyarakat desa pada Desa Duku Ilir tetapi menurut beberapa informan bahwa program yang dijalankan nantinya oleh pihak pengelola BUMDes DKI JAYA tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Duku Ilir dalam rapat. Apakah masyarakat Desa Duku Ilir berperan aktif dengan pihak BUMDes dalam program yang dilaksanakan. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Kurang, hanya beberapa masyarakat saja yang ikut dalam program BUMDes saat ini.”¹⁰⁹

Pendapat Bapak Dedi diperkuat oleh pernyataan Bapak Adam Khalik sebagai kepala desa:

“Masyarakat kurang ikut berperan dalam kegiatan BUMDes, tetapi mereka selalu menanyakan tentang program BUMDes kepada saya.”¹¹⁰

Pendapat serupa juga disampaikan oleh bapak Rike sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

¹⁰⁹ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

¹¹⁰ Adam Khalik, *wawancara*, tanggal 17 Juni 2023, pukul 16.20 Wib.

“Menurut saya agak kurang, karena cuma ada beberapa masyarakat saja yang biasanya datang dalam rapat atau yang ikut berperan dengan BUMDes.”¹¹¹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Yunita sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

“Masyarakat yang terlibat dalam program BUMDes DKI JAYA hanya sedikit, mungkin banyak yang ingin terlibat tapi program yang dijalankan oleh pihak BUMDes tidak sesuai dengan keahliannya, dan mereka yang menjalankan program saja jarang terlibat dalam rapat atau kegiatan lainnya yang dijalankan BUMDes DKI JAYA.”¹¹²

Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa masyarakat Desa Duku Ilir kurang aktif untuk berpartisipasi bersama dengan BUMDes dan hanya terdapat beberapa masyarakat saja yang berperan dalam menjalankan programnya, serta masyarakat yang menjalankan program BUMDes juga kurang aktif terlibat dalam kegiatan BUMDes DKI JAYA.

Apakah kegiatan BUMDes tidak hanya dievaluasi dan diawasi oleh pemerintah desa tetapi juga dievaluasi oleh pihak masyarakat. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Dalam kepengurusan kami ada pengawas dari masyarakat, beberapa orang dan pemerintah desa jelas ikut dalam pengawasannya, jika untuk mengevaluasi program tidak semua masyarakat dilibatkan hanya mereka yang menjalankan program usaha saja yang diundang, itu saja mereka tidak datang .”¹¹³

Hal serupa juga disampaikan Bapak Rike selaku masyarakat Desa Duku Ilir:

¹¹¹ Rike, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 19:05 Wib.

¹¹² Yunita, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 19.05 Wib.

¹¹³ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

“Seharusnya ada, karena tidak mungkin masyarakat tidak mengawasi kegiatan BUMDes karena itu juga menyangkut kegiatan yang mungkin akan menguntungkan mereka.”¹¹⁴

Pendapat serupa disampaikan oleh Ibu Yunita sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

“Menurut saya ya, seharusnya iya ada evaluasi atau pengawasan dari masyarakat kepada kegiatan BUMDes. Tapi untuk disampaikan kepada pihak BUMDes itu mungkin susah, karena dalam rapatnya saja masyarakat banyak tidak diundang.”¹¹⁵

Hal serupa juga disampaikan Bapak Zul Andri sebagai pelaksana unit usaha aluminum serta pengawas BUMDes DKI JAYA:

“Kami pihak pengawas BUMDes mengawasi program dan kegiatannya, juga melakukan evaluasi atau menyampaikan hal yang menurut kami kurang baik bagi masyarakat ataupun BUMDes itu sendiri.”¹¹⁶

Berdasarkan jawaban diatas bahwa hanya beberapa masyarakat yang diberikan kewenangan untuk mengawasi serta melakukan evaluasi program dan pelaksanaan kegiatan BUMDes tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat lainnya juga mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak BUMDes DKI JAYA karena masyarakat merasa bahwa kegiatan BUMDes akan berdampak kepada mereka serta evaluasi tersebut dapat membantu pihak BUMDes DKI JAYA sendiri dalam upaya pembaharuan serta evaluasi kerjanya untuk dapat berkembang dan lebih berguna untuk masyarakat Desa Duku Ilir kedepannya.

¹¹⁴ Rike, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 19:05 Wib.

¹¹⁵ Yunita, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 18:45 Wib.

¹¹⁶ Zul Andri, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 16:45 Wib.

Bagaimana pihak BUMDes DKI JAYA dapat mengakhiri program yang telah dijelankannya. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Biasanya kami menyelesaikan suatu program itu jika program itu tidak berkembang atau juga tidak memberikan keuntungan baik kepada masyarakat itu sendiri ataupun pihak BUMDes dan juga program yang mengalami kerugian besar dalam beberapa periode perhitungannya.”¹¹⁷

Pendapat serupa disampaikan oleh Ibu Evita sebagai Bendahara BUMDes DKI JAYA:

“ Kami hanya sekali menghentikan program unit usaha, itu juga karena tidak terdapat keuntungan bagi masyarakat serta memberikan kerugian yang besar bagi BUMdes ini sendiri.”¹¹⁸

Pendapat serupa juga disampaikan Bapak Adam Khalik sebagai kepala desa:

“Kami telah menganjurkan pihak BUMDes untuk menghentikan program yang merugikan pihak BUMDes itu sendiri ataupun yang tidak berdampak bagi masyarakat desa.”¹¹⁹

Berdasarkan jawaban diatas bahwa program itu akan diakhiri jika memberikan kerugian yang besar bagi pihak BUMDes ataupun yang tidak berdampak bagi masyarakat dan juga pihak BUMDes DKI JAYA. Apakah keberadaan BUMDes DKI JAYA memberikan dampak kepada masyarakat serta mampu membantu masyarakat Desa Duku Ilir. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

¹¹⁷ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

¹¹⁸ Evita, *wawancara*

¹¹⁹ Adam Khalik, *wawancara*, tanggal 17 Juni 2023, pukul 16.20 Wib.

“Menurut saya program ataupun usaha BUMDes memberikan dampak kepada masyarakat Desa Duku Ilir, dan juga mampu membantu mereka.”¹²⁰

Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Adam Khalik sebagai kepala desa di Desa Duku Ilir:

“Bumdes belum sepenuhnya membantu masyarakat desa saya tetapi mereka memberikan dampak positif untuk beberapa masyarakat di Desa Duku Ilir ini.”¹²¹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Sulastri selaku pelaksana unit usaha pembuatan kue:

“Program BUMDes ini sangat membantu kami ibu-ibu bisa mendapatkan penghasilan melalui unit usaha ini, bukan hanya pembuatan kue saja tetapi unit usaha lainnya juga sangat membantu masyarakat terutama penyewaan tenda.”¹²²

Pendapat serupa juga disampaikan beberapa masyarakat sebagai pelaksana unit usaha BUMDes DKI JAYA:

“Untuk kami terasa memberikan dampak yang baik terutama dalam perekonomian kami.”¹²³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rike selaku masyarakat di Desa Duku Ilir:

“Menurut saya BUMDes kurang berdampak kepada seluruh masyarakat desa tetapi sangat berdampak pada mereka yang menjalankan program usaha BUMDes tersebut.”¹²⁴

Pendapat Bapak Rike juga dijelaskan oleh Ibu Yunita sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

“Bagi saya dampak BUMDes dapat dirasakan, tapi mungkin jauh lebih berdampak pada masyarakat yang sejalan dengan programnya.”¹²⁵

¹²⁰ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

¹²¹ Adam Khalik, *wawancara*, tanggal 17 Juni 2023, pukul 16.20 Wib.

¹²² Sulastri, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:50 Wib.

¹²³ Zul Andri, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 16.45 Wib.

¹²⁴ Rike, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 19:05 Wib.

Berdasarkan jawaban diatas bahwa BUMDes DKI JAYA memberikan dampak bagi masyarakat baik itu dari perekonomian ataupun sosial masyarakat, tetapi menurut beberapa informan dampak tersebut hanya dirasakan oleh pihak masyarakat yang menjalankan program usaha bersama pihak BUMDes DKI JAYA juga mampu membantu masyarakat Desa Duku Ilir melalui program usahanya walaupun tidak dalam perekonomian tetapi terbantu dalam kegiatan sosial masyarakat tersebut.

Bagaimana dampak dalam perekonomian yang diberikan BUMDes DKI JAYA kepada masyarakat Desa Duku Ilir. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa BUMDes memberikan dampak kepada masyarakat, BUMDes berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang ikut berperan dalam program unit usaha BUMDes dan mampu menjalankan dengan baik program unit usaha tersebut.”¹²⁶

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Adam Khalik sebagai

Kepala Desa :

“Saya sudah menjelaskan tadi bahwa BUMDes DKI JAYA berdampak pada perekonomian masyarakat, jika masyarakat mampu menjalankan program BUMDes itu dengan baik saya yakin mereka akan sangat terbantu dan mereka juga bisa membantu masyarakat yang lainnya dari program BUMDes tersebut.”¹²⁷

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sulastri sebagai pelaksana unit usaha pembuatan kue:

¹²⁵ Yunita, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 18:45 Wib.

¹²⁶ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

¹²⁷ Adam Khalik, *wawancara*, tanggal 17 Juni 2023, pukul 16.20 Wib.

“Sangat terbantu menurut saya, karena jika kami ingin membuka usaha sendiri modal yang kami butuhkan sangatlah besar sedangkan kami tidak sanggup untuk membelinya, dengan programnya BUMDes DKI JAYA mampu memberikan dampak yang sangat baik bagi kami. Dan kami bisa mengajak masyarakat lain untuk ikut karena dalam pembuatan kue saya tidak mampu membuatnya sendiri, sehingga bisa memberikan pendapatan tambahan untuk yang lain.”¹²⁸

Pernyataan yang lainnya juga disampaikan oleh Bapak Rike sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

“Seperti kata saya tadi bahwa program BUMDes DKI JAYA memberikan dampak bagi masyarakat desa, tetapi hanya pada beberapa masyarakat yang berdampak pada perekonomiannya. Saya juga merasa terbantu dengan program yang mereka jalankan, sehingga untuk menyewa tenda tidak perlu keluar desa.”¹²⁹

Pendapat Bapak Rike diperkuat oleh pernyataan yang diberikan Ibu Yunita sebagai masyarakat Desa Duku Ilir:

“Kalo dampak diperekonomian seperti kata saya tadi, hanya mereka yang sejalan dengan program BUMDes yang diberikan dampak bagi perekonomiannya.”¹³⁰

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Raden sebagai pelaksana unit usaha sewa tenda:

“Alhamdulillah berdampak baik bagi perekonomian kami. Serta dengan menyewakan tenda itukan dapat membantu memudahkan masyarakat lain dalam keberhasilan acara mereka.”¹³¹

Berdasarkan jawaban dari para informan diatas diketahui bahwa BUMDes DKI JAYA memberikan dampak bagi perekonomian

¹²⁸ Sulastri, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:50 Wib.

¹²⁹ Rike, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 19:05 Wib.

¹³⁰ Yunita, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 18:45 Wib.

¹³¹ Raden, *wawancara*, tanggal 26 Juli 2023, pukul 16:15 Wib.

masyarakat Desa Duku Ilir terutama bagi masyarakat yang menjalankan program unit usaha BUMDes DKI JAYA.

2. Kendala yang Dihadapi BUMDes DKI JAYA Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Duku Ilir

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian diatas maka diajukan beberapa pertanyaan kepada informan inti, yaitu bapak Dedi Saputra selaku Ketua BUMDes DKI JAYA dan juga Bapak Adam Khalik sebagai Kepala desa di Desa Duku Ilir. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDes DKI JAYA dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Untuk kendala itu lumayan banyak, yaitu BUMDes belum memiliki kantor, jangankan kantor sendiri BUMDes juga tidak memiliki bagian dari ruangan yang ada pada balai desa di Desa Duku Ilir ini, serta kendala lainnya yang kami hadapi terletak pada pemahaman masyarakat desa, dimana hanya sedikit dari mereka saja yang ingin ikut berpartisipasi menjalankan program usaha yang kami jalankan. Adapula kendala berikutnya yaitu permodalan dimana dana yang ditujukan kepada BUMDes untuk 2 tahun ini belum diturunkan lagi oleh pemerintah sehingga kami tidak mampu membuat program usaha yang lainnya lagi dan hanya menjalankan program unit usaha yang telah berjalan saja, hal itu karena pengurus BUMDes DKI JAYA yang lama tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban tahun 2020 kepada pihak pemerintah desa dan juga pihak BUMDes DKI JAYA sekarang ini.”¹³²

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Evita sebagai Bendahara BUMDes DKI JAYA:

¹³² Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

“ Untuk kendalanya itu yang paling utama itu modal, karena untuk menjalankan sebuah kegiatan itu dibutuhkan dana atau modal.”¹³³

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dedi Saputra juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Adam Khalik sebagai kepala desa:

“Menurut saya kendala terbesar dari BUMDes DKI JAYA ini karena pengurus BUMDes yang lama tidak menyerahkan laporannya pada tahun 2020 kepada pihak pemerintah desa ini sehingga pemerintah desa tidak mampu memberikan modal, serta untuk mengajukan dana kepada pemerintah daerah pihak BUMDes juga harus mempersiapkan laporan tahunannya karena itu akan menjadi bahan pertimbangan. Karena untuk dua tahun belakang ini dana untuk BUMDes itu sendiri tidak turun sehingga pihak BUMDes tidak ada melakukan kegiatan baru dan untuk saat ini BUMDes hanya menjalankan program mereka yang lama.”¹³⁴

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Ibu Yuni selaku Bendahara di Desa Duku Ilir:

“Menurut saya ya, kendala yang dihadapi pihak BUMDes itu hanya pada permodalannya, karena untuk beberapa tahun ini tidak ada dana yang dianggarkan kepada pihak BUMDes DKI JAYA.”¹³⁵

Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa kendala yang dihadapi BUMDes DKI JAYA terletak pada keterlambatan pengurus BUMDes DKI JAYA yang lama dalam menyerahkan laporan pertanggung jawabannya kepada pemerintah desa di Desa Duku Ilir dan juga pihak pengurus BUMDes DKI JAYA yang baru, sehingga menghambat kinerja BUMDes ataupun pengembangan BUMDes itu sendiri. Kemudian tidak tersedianya ruang kerja atau kantor kerja untuk BUMDes DKI JAYA di Desa Duku Ilir serta permodalannya dan juga

¹³³ Evita, wawancara, tanggal 26 Juli 2023, pukul 19:15 Wib.

¹³⁴ Adam Khalik, wawancara, tanggal 17 Juni 2023, pukul 16.20 Wib.

¹³⁵ Yuni, wawancara, tanggal 26 Juli 2023, pukul 19:30 Wib.

pada pemahaman masyarakat Desa Duku Ilir yang masi kurang mengenai BUMDes itu sendiri.

3. Strategi yang Dilakukan BUMDes DKI JAYA Dalam Menghadapi Kendala Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Duku Ilir

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian diatas maka diajukan beberapa pertanyaan kepada informan inti, yaitu bapak Dedi Saputra selaku Ketua BUMDes DKI JAYA dan juga Bapak Adam Khalik sebagai kepala desa di Desa Duku Ilir. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara yang dilakukan BUMDes untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir?

“Menurut saya sendiri jalan keluarnya ada pada pemerintah desa yang diharapkan tahun ini mampu membantu untuk memberikan sebagian dari ruangan dibalai desa untuk ruang kerja BUMDes atau dapat membantu BUMDes untuk mengajukan dan mendapatkan dana lebih dari pemerintah atas untuk infastruktur serta modal untuk programnya, dan untuk pemahaman masyarakat kami akan sering memberikan informasi tentang BUMDes dikegiatan masyarakat ataupun dalam kegiatan pemerintahan desa.”¹³⁶

Berdasarkan jawaban diatas diketahui strategi yang dilakukan BUMDes adalah dengan mengajukan permohonan untuk peminjaman ruangan yang ada dibalai desa untuk ruang kerja BUMDes DKI JAYA serta melakukan pengajuan dana untuk infrastruktur ataupun modalnya kepada pemerintah pusat yang dibantu oleh pemerintah desa dan

¹³⁶ Dedi Saputra, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, pukul 18:35 Wib.

melakukan penyuluhan aktif melalui kegiatan masyarakat ataupun kegiatan pemerintahan desa mengenai BUMDes DKI JAYA kepada seluruh masyarakat dan dapat mengundang seluruh masyarakat untuk rapat terbuka BUMDes DKI JAYA agar mereka dapat bergabung serta bekerja sama dengan BUMDes untuk membantu mewujudkan tujuan dari BUMDes DKI JAYA itu sendiri yakni pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

B. Pembahasan

Berdasarkan teori Zubaedi pemberdayaan adalah upaya mendirikan masyarakat melalui potensi kemampuan yang dimiliki, yang berarti masyarakat diberdayakan dengan melihat serta memilih sesuatu yang memiliki manfaat baginya.¹³⁷ Adapun pendapat Soetomo pemberdayaan merupakan suatu kegiatan dalam mengubah keadaan masyarakat dengan standar hidup rendahbaik dari aspek perekonomian ataupun sosial budayanya menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹³⁸ Teori serupa juga disampaikan oleh Suharto bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses dan tujuan. Proses memperkuat dan mengubah kelompok ataupun individu dengan masalah kemiskinan. Dengan tujuan mengubah keadaan perekonomian ataupun sosial.¹³⁹ Serta Darwanto menjelaskan pemberdayaan adalah suatu usaha membangun daya atau kekuatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

¹³⁷ Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA,2007),hlm.24.

¹³⁸ Soetomo, *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkan Dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014),hlm.34.

¹³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005),hlm.60.

perekonomian dengan memberikan motivasi, mendorong, serta menggali potensi. Sehingga mampu mengubah suatu kondisi yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dengan adanya suatu tindakan nyata untuk meningkatkan harta ataupun martabat dari sisi ekonomi serta melepaskan diri dari keterbelakangan dan kemiskinan.¹⁴⁰

Selanjutnya Isbandi Rukminto Adi menyebutkan bahwa terdapat tujuh tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu:¹⁴¹

1. Tahapan Persiapan

Tahap ini harus melakukan dua tahapan, yaitu penyimpanan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh *community worker*. Serta penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan dan disiapkan secara *non-direktif*.

Dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas bahwa pihak BUMDes DKI JAYA telah mempersiapkan dengan baik semua perlengkapan ataupun masyarakat itu sendiri untuk menjalankan program BUMDes tersebut. Dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat dan juga memenuhi keperluan inti dari program tersebut, tetapi masyarakat juga harus memenuhi keperluan lainnya yang mungkin tidak diketahui oleh pihak BUMDes DKI JAYA.

¹⁴⁰ Darwanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 12 No.13 (2016), hlm.68.

¹⁴¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.63.

2. Tahapan Pengkajian

Tahap ini adalah suatu proses pengkajian yang dapat dilakukan pada masyarakat baik secara berkelompok atau individu. Pada tahapan ini para petugas harus dapat mengetahui ataupun mengidentifikasi masalah mengenai kebutuhannya serta sumber daya yang dimiliki klien.¹⁴²

Dari hasil wawancara diatas pada bagian pengkajian BUMDes DKI JAYA belum melakukan dengan baik hal tersebut karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pihak BUMDes sehingga dalam melaksanakan rapatnya hanya beberapa perwakilan masyarakat yang diundang serta hadir untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka tentang apa yang mereka perlukan dan potensi apa yang dapat mereka jalankan untuk program BUMDes itu sendiri, sedangkan masyarakat lain yang memiliki gagasan tentang kebutuhannya tidak dapat menghadiri rapat tersebut karena tidak diundang oleh pihak BUMDes mereka tidak mengetahui bahwa rapat terbuka tersebut dapat saja dihadiri oleh mereka.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Progam atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba untuk melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang berbagai masalah yang dihadapi dan juga solusinya. Dalam hal ini masyarakat dapat berfikir tentang beberapa alternatif progam yang efektif dan dapat dilakukan.

¹⁴² Isbandi, (2013),hlm.63.

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas pada bagian perencanaan kegiatannya BUMDes DKI JAYA BUMDes tidak melaksanakannya dengan baik, karena hanya ada beberapa masyarakat yang dihadirkan serta hanya sedikit gagasan rencana saja yang mereka terima sedangkan seharusnya banyak gagasan perencanaan yang harus dipertimbangkan untuk dijalankan sebagai program BUMDes DKI JAYA kedepannya, karena semakin banyak masyarakat yang diikut sertakan maka semakin banyak gagasan program yang diterima maka hal tersebut nantinya sangat berdampak pada keberhasilan program BUMDes itu sendiri ataupun masyarakat Desa Duku Ilir.

4. Tahap Pemformalisasi Rencana aksi

Tahap ini agen perubahan membantu masyarakat dalam merumuskan, merancang, menentukan kegiatan atau program dalam penyelesaian permasalahannya. Serta petugas juga membantu untuk memformalisasikan semua gagasan kedalam bentuk tertulis terutama jika itu berbentuk sebuah proposal kepada para penyandang dana.¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pemformalisasi rencana bahwa BUMDes DKI JAYA menerima dengan baik setiap gagasan yang diberikan masyarakat dan untuk gagasan ataupun ide yang diberikan masyarakat serta menurut para informan hanya saja program yang dijalankan nantinya tidak sesuai dengan gagasan yang mereka sampaikan dalam rapat.

¹⁴³ Isbandi, (2013),hlm.65.

5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahapan dimana dalam mengupayakan pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat peran dari masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan karena diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dijalankan dan yang telah dikembangkan. Adanya kegiatan kerja sama antara petugas dan masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan program yang telah dirancang sebelumnya dan mengantisipasi jika program tersebut tidak sesuai dilapangan.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama informan bahwa BUMDes DKI JAYA dalam tahapan pelaksanaan belum melibatkan masyarakat Desa Duku Ilir, karena hanya beberapa masyarakat saja yang ingin terlibat dan dilibatkan dengan kegiatan yang dijalankan BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap kegiatan yang dijalankan BUMDes hanya beberapa masyarakat saja yang diundang dan menghadirinya.

6. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi yaitu sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dalam jangka waktu yang pendek membentuk suatu kelompok dalam melakukan pengawasan secara

¹⁴⁴ Isbandi, (2013), hlm.65.

internal, serta dalam jangka panjang dapat membantu komunikasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa BUMDes DKI JAYA pada tahap evaluasi telah melaksanakannya, dalam perencanaan program serta pelaksanaan kegiatannya BUMDes DKI JAYA diawasi oleh beberapa pihak yaitu dari pemerintah desa dan juga masyarakatnya desa serta dalam kepengurusannya ada beberapa masyarakat yang menjadi pengawas.

7. Tahap Terminasi

Ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, dalam tahap ini program diharapkan segera berakhir.¹⁴⁵

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas pada tahap terminasi BUMDes DKI JAYA mengakhiri program usahanya yang memberikan kerugian besar kepada pihak BUMDes dan juga program yang tidak berdampak pada perekonomian masyarakat setelah dijalankan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, BUMDes DKI JAYA belum sepenuhnya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir karena gagasan masyarakat mengenai potensi ataupun kebutuhan mereka tidak dapat disampaikan, serta dalam perencanaan programnya BUMDes DKI JAYA tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat serta hanya menerima sedikit ide ataupun gagasan masyarakat sehingga program yang dijalankan tidak begitu

¹⁴⁵ Isbandi, (2013),hlm.66.

efektif dalam mengelola potensi dan membantu masyarakat desa. Serta dalam pelaksanaan kegiatannya hanya sedikit masyarakat yang terlibat dengan program BUMDes, yang mana masyarakat itu sendiri merupakan hal terpenting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga BUMDes DKI JAYA belum mampu mengembangkan sumber daya manusia dan hal tersebut berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat Desa Duku Ilir.

Untuk mewujudkan suatu tujuan dalam sebuah lembaga pasti akan ditemukannya kendala ataupun hambatan, hal itu juga terjadi pada BUMDes DKI JAYA. Kendala yang dihadapi pihak BUMDes DKI JAYA dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terletak pada permodalannya, permodalan atau dana untuk pihak BUMDes DKI JAYA terhambat karena terjadinya kesalahan pada pengurus yang lama, hal itu dikarenakan mereka tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban ataupun laporan keuangannya kepada pemerintah desa dimana laporan tersebut akan digunakan pemerintah desa untuk mempertimbangkan pemberian dana dari desa sendiri ataupun untuk proposal pengajuan dana BUMDes kepada pemerintah pusat. Sehingga mengakibatkan dana BUMDes DKI JAYA sendiri tidak diturunkan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah pusat selama dua tahun kebelakang.

Kendala selanjutnya terletak pada kantor ataupun ruang kerja BUMDes DKI JAYA, dimana BUMDes DKI JAYA tidak memiliki kantor ataupun ruangan tersendiri dibalai desa pada Desa Duku Ilir. Dan dalam setiap kegiatannya pihak BUMDes menjadikan rumah sekretaris sebagai tempat kerja, yang mana sekretaris tersebut merupakan seorang mahasiswi dan tidak selalu diam dirumah. Kondisi itu

mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan operasional BUMDes DKI JAYA di Desa Duku Ilir.

Kendala berikutnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Desa Duku Ilir mengenai BUMDes DKI JAYA, yang mana hanya beberapa masyarakat saja yang memiliki pengetahuan tentang BUMDes tetapi mereka hanya menyampaikan gagasan mereka untuk menguntungkan dirinya serta memanfaatkan program BUMDes tersebut.

Strategi dalam penyelesaian suatu kendala yang mengakibatkan terjadi hambatan pada proses pemberdayaan itu sangat diperlukan, Disini BUMDes DKI JAYA memiliki strategi dalam menghadapi kendala yang terjadi. Untuk dana BUMDes yang tidak turun setelah dua tahun kebelakang pihak BUMDes bersama dengan pemerintah desa telah memberikan teguran serta surat panggilan dari pemerintah desa untuk anggota BUMDes DKI JAYA yang lama agar segera menyerahkan laporan pertanggung jawaban mereka kepada pihak BUMDes, serta pihak BUMDes DKI JAYA akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk pengajuan dana BUMDes kepada pemerintah daerah Rejang Lebong, dan proposal pengajuan dana kepada pemerintah desa akan segera diserahkan sesuai dengan arahan kepala desa di Desa Duku ilir.

Kemudian dalam permasalahan kantor ataupun ruang kerja BUMDes DKI JAYA pihak BUMDes sendiri akan menyerahkan surat permohonan peminjaman ruangan dibalai Desa Duku Ilir untuk dipergunakan sebagai ruang kerja BUMDes. Untuk strategi pada kendala berikutnya yaitu mengenai pemahaman masyarakat Desa Duku Ilir mengenai peranan BUMdes DKI JAYA yang

sepenuhnya, maka pihak BUMDes bersama dengan pemerintah desa akan gencar melakukan sosialisasi mengenai peranan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial masyarakat ataupun kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan desa pada Desa Duku Ilir.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Hal ini penting dilakukan agar dapat dipahami dan dipersepsikan sama oleh semua pihak baik itu pemerintah desa, BPD, Pemkab, ataupun kalangan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: pertama, Kooperatif yakni semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kedua, Partisipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. BUMDes DKI JAYA dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir belum terlaksana, hal tersebut berdasarkan teori yang peneliti gunakan serta dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dimana 10 informan menyatakan bahwa masyarakat Desa Duku Ilir kurang terlibat serta tidak melibatkan masyarakat dengan kegiatan BUMDes DKI JAYA, serta 6 informan menyatakan bahwa kebutuhan atau permasalahan masyarakat Desa Duku Ilir tidak dapat disampaikan. Karena belum melibatkan sebagian besar masyarakat sehingga banyak sumber daya manusia dan potensi di Desa Duku Ilir tidak dimanfaatkan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi BUMDes DKI JAYA dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Duku Ilir yaitu, belum tersedianya kantor kerja BUMDes, tidak adanya dana akibat permasalahan pengurus lama BUMDes, serta pemahaman masyarakat terhadap BUMDes DKI JAYA.
3. Strategi yang dilakukan BUMDes DKI JAYA dalam mengatasi kendala yang menghambat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain dengan melakukan kerja sama dengan

spemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan dana ataupun kantor kerja BUMDes. Serta melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk bekerja sama dengan pengelolaan BUMDes.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan.

1. Untuk BUMDes DKI JAYA diharapkan kedepannya mampu melakukan semua tahapan dalam pemberdayaan serta dapat melibatkan sebagian besar masyarakat dalam kegiatannya sehingga lebih efektif dan mampu mengembangkan potensi masyarakat desa dengan baik.
2. Agar pelaksanaan kegiatan BUMDes DKI JAYA dapat berjalan baik maka harus didukung dengan adanya anggaran dana serta sumber daya manusia. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat membantu permasalahan dana BUMDes serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan BUMDes DKI JAYA.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat menjadi rujukan serta pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmadi, Rulam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. 1 ed. 1. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014.
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (t.t.).
- Andreas, dkk. *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*. Medan: Raja Garuda, 2016.
- Ar Royyan, dan dkk. *Ekonomi Desa*. Banda Aceh: Natural Aceh, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ashari, Muhammad. *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 2009.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Republik Indonesia*. Al-Qur'an dan Terjemah. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Hutomo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas, 2000.
- M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Maryunani. *Pembangunan BUMDes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Progam IDT*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nainggolan, Benny Rojeston Marnaek, dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar. *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Najib, Mohammad. *BUMDES: Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.
- Naway, Fory A. *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.

- Nofriansyah, Deny. *Analisis Kinerja Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Library.Stiba.ac.id, 2014.
- Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Jl. Ekarasmi Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016. *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016, t.t.
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (t.t.).
- Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa nusantara (PP-RPDN). *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasioanal Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawiajaya, 2007.
- Renstra (Rencana Strategis), Direktorat Jenderal Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2019.
- SK Kepala Desa No. 03/II/2021, Desa Duku Ilir, Curup Timur.
- Soeharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Ptfrika Aditama, 2005.
- Soekanto, Soejono. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Surya, Anom. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Suryawati. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Jarnasy, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, David. *BUM DESA*. 1 ed. 1. Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018.
- Yasin, Muhammad, dan dkk. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015.
- Yulizar D, Sanrego, dan M. Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*. Cet. Pertama. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Zubaedi. *Wacana Pengembangan Alternatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007.

JURNAL:

- Chikmawati, Zulifah. "Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* Vol.5 No.1 (Januari 2019).

- Darwanto. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 12 No.13 (2016).
- Data Penduduk, Desa Duku Ilir, 2022.
- Endah, Kiki. "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa." *Jurnal Moderat* Volume 6 No. 1 (Februari 2021).
- Gunawan, Harry, Sofyan Muhlisin, Dan Gunawan Ikhtiono. "Analisis Pengelolaan Bumdes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Bumdes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor." *El-Mal :Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol.5 No.1 (2022).
- Harry Gunawan, Sofyan Muhlisin, Dan Gunawan Ikhtiono. "Analisis Pengelolaan Bumdes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Bumdes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor." *El-Maal :Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Volume 5 Nomor 1 (2022). <https://doi.org/1047467/Elmal.V5i1.619>.
- Haryanto, Eko Sri, Dan Dkk. *Pengembangan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Ismawati, Neneng Rini. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Bumdes Sabar Subur Desa Teluk, Terate Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang-Banten)." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.6 No.1 (2020).
- . "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume. 6 No 1 (16 Juni 2020). <https://dx.doi.org/10.32678/Lbrmasy.V6i1.4250>.
- Kusuma, Amelia. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Jurnal Hukum* Vol.5 No.1 (2014).
- Laporan Tahunan BUMDes DKI JAYA, Desa Duku Ilir, 2019.
- Mahalizikri, Irawan Fakhruhin. "Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha Bumdes Desa Sepotong." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Volume 8 No.1 (Juni 2019).
- Muhammad Fajar Nandra Caya Dan Ety Rahayu. "Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung." *Urnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Jilid 20 No.11 (April 2019).
- Nardin, Yulianus. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes." *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 8 No. 3 (2019).

- Prasetyo, Ratna Azis. "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Dialektika* Volume Xi No.1 (Maret 2016).
- Ridlwani, Zulkarnain. "Payung Hukum Pembentukan Bumdes." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3 (Desember 2013).
- . "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.3 (September 2014).
- Saputri, Oktavina Ardita. "Peran Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngunut (Studi Kasus : Bumdes Ngudi Sejahtera, Ngunut, Tulungagung)." Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.
- Suprojo, Ferdi Harobu Ubi Laru Agung. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)." *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmupolitik* Vol. 8 No. 4 (2019).
- Wijaya, Mahendra. "Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Journal Of Rural And Development* Volume 1 No. 1 (Februari 2010).
- Wiratala, Desti. "Pengaruh Pengelolaan Dan Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)." Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.
- Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Dan Muhammad Arif Nasution. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 10 No.1 (Juni 2018).

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara bersama Ketua BUMDes DKI JAYA



Wawancara bersama Kepala desa di Desa Duku Ilir



Wawancara bersama Ibu Sulastri pengelola unit usaha pembuatan kue



Wawancara bersama Masyarakat Desa Duku Ilir



Kegiatan unit usaha pembuatan kue



Kegiatan unit usaha peternakan kambing yang dikelola oleh masyarakat



Kegiatan unit usaha sewa alat tenda yang dikelola oleh masyarakat



Kegiatan unit usaha alumunium yang dikelola oleh masyarakat

Lambang BUMDes DKI JAYA Desa Duku Ilir

